



**DAMPAK PEMEKARAN WILAYAH TERHADAP
TINGKAT KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
DI KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA**

TESIS

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Magister
Sosial Pada Program Magister Ilmu Kependudukan Dan Ketenagakerjaan**

Oleh:

**FITRI NOFIYANTI
NIM: P2F220003**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU KEPENDUDUKAN
DAN KETENAGAKERJAAN
PASCASARJANA
UNIVERSITAS JAMBI
FEBRUARI 2024**

PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Saya dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademis di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka. Apabila ternyata di dalam naskah tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia tesis ini digugurkan dan gelar akademik saya telah saya peroleh (Magister Sosial) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Jambi, Maret 2024

Fitri Nofiyanti
NIM P2F220003



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JAMBI
PASCASARJANA – MAGISTER ILMU KEPENDUDUKAN DAN
KETENAGAKERJAAN

Sekretariat: Kampus Unja Telanaipura, Telp./Fax 0741 – 60285,
Website : www.unja.ac.id E-mail : pcsunja@gmail.com

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

TANGGAL UJIAN :
NAMA : Fitri Nofiyanti
NIM : P2F220003
PROGRAM STUDI : Magister Ilmu Kependudukan dan
Ketenagakerjaan
JUDUL : Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Tingkat
Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Musi
Rawas Utara

Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Program Magister Ilmu
Kependudukan dan Ketenagakerjaan, pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 27 Februari 2024
Jam : 14.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Lantai 2 Pasca Sarjana

SUSUNAN TIM PENGUJI

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Prof.Dr.Yulmardi.,S.E.,M.S	Ketua	1.
2.	Dr.Zamzami.,S.E.,M.S	Sekretaris	2.
3.	Dr.Ir.Ernawati HD.,M.P	Pembahas Utama	3.
4.	Prof.Dr.H.Haryadi,S.E.,M.M.S	Pembimbing 1	4.
5.	Dr.Ummi Kalsum,S.KM.,M.KM	Pembimbing 2	5.

Jambi, Maret 2024

Mengesahkan
Direktur Program Pascasarjana
Universitas Jambi

Mengetahui,
Ketua Program Studi

Prof. Dr. H. Haryadi, S.E., M.M.S
NIP. 196504011990031002

Prof. Dr. Yulmardi, S.E., M.S
NIP. 195906041986031002



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JAMBI
**PASCASARJANA – MAGISTER ILMU KEPENDUDUKAN DAN
KETENAGAKERJAAN**

Sekretariat: Kampus Unja Telanaipura, Telp./Fax 0741 – 60285,
Website : www.unja.ac.id E-mail : pcsunja@gmail.com

TANDA PERSETUJUAN PEMBIMBING

TANGGAL UJIAN : Selasa, 27 Februari 2024
NAMA : Fitri Nofiyanti
NIM : P2F220003
PROGRAM STUDI : Magister Ilmu Kependudukan dan
Ketenagakerjaan
JUDUL : Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Tingkat
Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Musi
Rawas Utara

Telah layak dan memenuhi syarat untuk dibukukan/dicetak sesuai dengan prosedur, ketentuan, dan kelaziman yang berlaku.

Jambi, Maret 2024

Mengetahui:

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. H. Haryadi, S.E., M.M.S
NIP. 196504011990031002

Dr. Ummi Kalsum, S.K.M., M.K.M
NIP. 197503211997032002



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JAMBI
**PASCASARJANA – MAGISTER ILMU KEPENDUDUKAN DAN
KETENAGAKERJAAN**

Sekretariat: Kampus Unja Telanaipura, Telp./Fax 0741 – 60285,
Website : www.unja.ac.id E-mail : pcsunja@gmail.com

TANDA PERSETUJUAN KETUA PROGRAM STUDI

TANGGAL UJIAN : Selasa, 27 Februari 2024
NAMA : Fitri Nofiyanti
NIM : P2F220003
PROGRAM STUDI : Magister Ilmu Kependudukan dan
Ketenagakerjaan
JUDUL : Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Tingkat
Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Musi
Rawas Utara

Telah layak dan memenuhi syarat untuk dibukukan/dicetak sesuai dengan prosedur, ketentuan, dan kelaziman yang berlaku.

Jambi, Maret 2024
Ketua Program Studi Kependudukan
dan Ketenagakerjaan

Prof. Dr. Yulmardi, S.E., M.S
NIP. 195906041986031002

ABSTRAK

FITRI NOFIYANTI. P2F220003. Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Musi Rawas Utara Pembimbing Utama **Prof. Dr. H. Haryadi, S.E., M.M.S**, serta Pembimbing Pendamping **Dr. Ummi Kalsum, S.K.M., M.K.M.**

Pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) merupakan salah satu wujud desentralisasi yang bertujuan untuk pemerataan pembangun yang berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Musi Rawas Utara sebelum pemekaran wilayah dan setelah pemekaran wilayah. Tingkat kesejahteraan masyarakat tersebut lalu dianalisis untuk menemukan perbedaan yang mengarah kepada peningkatan kesejahteraan sebagai dampak dari pemekaran wilayah.

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang menggunakan analisis data *paired sample t-test* dengan alternatif *Wilcoxon signed rank test* sebagai metode analisis data. Sampel penelitian ini adalah 196 masyarakat Kabupaten Musi Rawas Utara yang telah berdomisili selama paling sedikit 5 (lima) tahun. Variabel penelitian ini adalah pemekaran wilayah sebagai variabel terikat, dan tingkat kesejahteraan masyarakat dengan aspek kesejahteraan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan sosial sebagai variabel tidak terikat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat peningkatan yang signifikan pada kesejahteraan masyarakat Kabupaten Musi Rawas Utara sebelum dan setelah pemekaran wilayah pada aspek kesejahteraan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan sosial yang artinya terdapat dampak dari pemekaran wilayah terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat.

Kata kunci: Pemekaran, Kesejahteraan, Ekonomi, Pendidikan, Kesehatan, Sosial

ABSTRACT

The creation of a New Autonomous Region (DOB) is an actualization of decentralization which aims to equitable development that oriented towards improving community welfare. This research aims to determine the level of welfare of the people of North Musi Rawas Regency before regional expansion and after regional expansion. The level of community welfare then analyzed to find differences that lead to increased welfare as a result of regional expansion.

This research is a quantitative research that uses paired sample t-test data analysis with the alternative Wilcoxon signed rank test as a data analysis method. The sample for this research was 196 community of North Musi Rawas Regency who had lived for at least 5 (five) years. The variables in this research are regional expansion as the dependent variable, and the level of community welfare with aspects of economic, educational, health and social welfare as the independent variable.

The results of the research shows that there is a significant increase in the welfare of the community of North Musi Rawas Regency before and after regional expansion in the aspects of economic, educational, health and social welfare, which means that there is an impact of regional expansion on the level of community welfare.

Keywords: Expansion, Welfare, Economic, Education, Health, Social

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karunia-Nya peneliti bisa menyelesaikan Tesis dengan judul **“Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Musi Rawas Utara”**. Penelitian Tesis ini bertujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Magister Sosial pada Program Pascasarjana Magister Ilmu Kependudukan dan Ketenagakerjaan Universitas Jambi.

Dalam penelitian Tesis ini, peneliti mendapatkan bantuan, dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Helmi, SH., MH Selaku Rektor Universitas Jambi
2. Bapak Prof. Dr. H. Haryadi, S.E., M.M.S, Selaku Direktur Pasca Sarjana Universitas Jambi.
3. Bapak Prof. Dr. Yulmardi, S.E., M.S, selaku Ketua Program Studi MIKK yang telah memberikan masukan dan saran bagi peneliti.
4. Bapak Prof. Dr. H. Haryadi, S.E., M.M.S, selaku pembimbing I Tesis yang penuh kesabaran telah membimbing peneliti dalam menyelesaikan Tesis ini.
5. Dr. Ummi Kalsum, S.K.M., M.K.M Selaku dosen pembimbing II Tesis yang telah memberikan dorongan dan bimbingan selama Penyelesaian Tesis ini.
6. Dr. Ir. Ernawati HD., MP selaku penguji utama, Prof. Dr. Yulmardi, S.E., M.S selaku ketua sidang, dan Dr. Zamzami, S.E., M.S selaku sekretaris sidang yang telah memberikan saran dan masukan yang sangat bermanfaat demi kesempurnaan tesis saya.
7. Seluruh dosen dan Staf Administrasi Pada Program Magister Ilmu Kependudukan dan Ketenagakerjaan yang telah dengan sabar memberikan Ilmu Pengetahuan selama bangku Perkuliahan di Program MIKK, serta memberikan pelayanan Administrasi dalam memperlancar pengurusan perkuliahan.
8. Kedua orang tua yang telah memberikan semua yang mereka punya dari saya kecil hingga dewasa, Bapak yang telah berjuang dengan tetesan keringat tanpa lelah, Sukri Aburman, dan Ibu yang tak jenuh memberi semangat lewat nasihat dan do'a, Nur Aisah
9. Kedua adik yang setiap hari membakar semangat ketika jiwa dan raga mulai goyah, dr. Melanza Parmiyati dan Si Imut Meyshilla Faiqqoh Fortuna Afifah
10. Teman tanpa tapi, Si Jenius yang semangatnya tak pernah kendor membantu penyelesaian kuliah mulai dari Strata 1 sampai Strata 2, Mr. Irwan Hadi

Syamsu, M.Pd

11. Teman sekelas seperjuangan, yaitu: Mbak Zubaidah, Mbak Rada, Mbak Rahma, Bang Taufik, Bang Pandu, Bang Apriyeldi, dan Bang Samsul
12. Abang dan Ayuk, Dr. Ramazani Novanda, M.Pd dan Nova Atriani Novanda, S.I.Kom yang terus bernasihat.
13. Sahabat/i Pergerakan yang bergerak untuk kebaikan bersama, Ramazani Janiardeni (Ketua PKC PMII Provinsi Jambi), Sukma Dewi Herlina (Ketua Kopri PKC PMII Provinsi Jambi), Ulandari, Novi Ramayani, Nurdiansyah, Hari Tri Handono, dan semua yang tidak bisa peneliti sebut satu persatu.
14. Semua pihak yang tidak peneliti sebutkan namanya satu persatu yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan Tesis ini.

Peneliti sangat menyadari bahwa dalam penelitian ini terdapat berbagai kekurangan. Oleh karena itu peneliti mengharapkan masukan dan saran yang bersifat konstruktif sangat diharapkan dan diterima dengan senang hati oleh peneliti.

Akhirnya semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membacanya.

Jambi, Maret 2024

Fitri Nofiyanti

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS	ii
LEMBAR PENGESAHAN TESIS.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
HALAMAN PERSETUJUAN KETUA PROGRAM STUDI.....	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Landasan Teori.....	10
2.1.1 Kesejahteraan.....	10
2.1.2 Desentralisasi dan Otonomi Daerah	19
2.1.3 Pemekaran Wilayah	22
2.1.4 Penelitian Terdahulu	29
2.1.5 Hipotesis Penelitian	32
2.1.6 Kerangka Teori dan Kerangka Pikir	32
2.1.7 Definisi Operasional Penelitian	35
2.1.8 Kerangka Konsep.....	36
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian.....	39
3.2 Waktu dan Tempat Penelitian.....	39
3.3 Jenis dan Sumber Data.....	40
3.4 Populasi dan Sampel	41
3.5 Teknik Sampling.....	42
3.6 Teknik Analisis Data.....	43

BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN

4.1 Kabupaten Musi Rawas Utara	46
--------------------------------------	----

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Karakteristik Responden	58
5.2 Hasil Penelitian	59
5.3 Pembahasan.....	70

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan	77
6.2 Saran	78

DAFTAR PUSTAKA	79
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN.....	85
----------------------	-----------

DAFTAR TABEL

1.	Tabel 2.1 Definisi Operasional Variabel Penelitian	36
2.	Tabel 3.1 Jumlah Penduduk Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020....	41
3.	Tabel 4.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Rentang Usia	57
4.	Tabel 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Rentang Jenis Kelamin...	58
5.	Tabel 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenjang Pendidikan.....	58
6.	Tabel 4.4 Nilai Rata-rata Tingkat Kesejahteraan Aspek Ekonomi Sebelum dan Sesudah Pemekaran Wilayah	59
7.	Tabel 4.5 Nilai Rata-rata Tingkat Kesejahteraan Aspek Pendidikan Sebelum dan Sesudah Pemekaran Wilayah	61
8.	Tabel 4.6 Nilai Rata-rata Tingkat Kesejahteraan Aspek Kesehatan Sebelum dan Sesudah Pemekaran Wilayah	62
9.	Tabel 4.7 Nilai Rata-rata Tingkat Kesejahteraan Aspek Sosial Sebelum dan Sesudah Pemekaran Wilayah	64
10.	Tabel 4.8 Hasil Uji Normalitas Data.....	66
11.	Tabel 4.9 Simpulan Data dan Hasil Uji Statistik Terhadap Dampak Pemekaran Wilayah Menurut Aspek Ekonomi, Pendidikan, Kesehatan, dan Sosial	67

DAFTAR GAMBAR

1. Gambar 1.1 IPM Muratara 2013-2019.....	2
2. Gambar 2.1 Bagan Kerangka Teoritis	33
3. Gambar 2.2 Skema Kerangka Berpikir	35
4. Gambar 2.3 Kerangka Konsep.....	37

BAB I

PENDAHULUAN

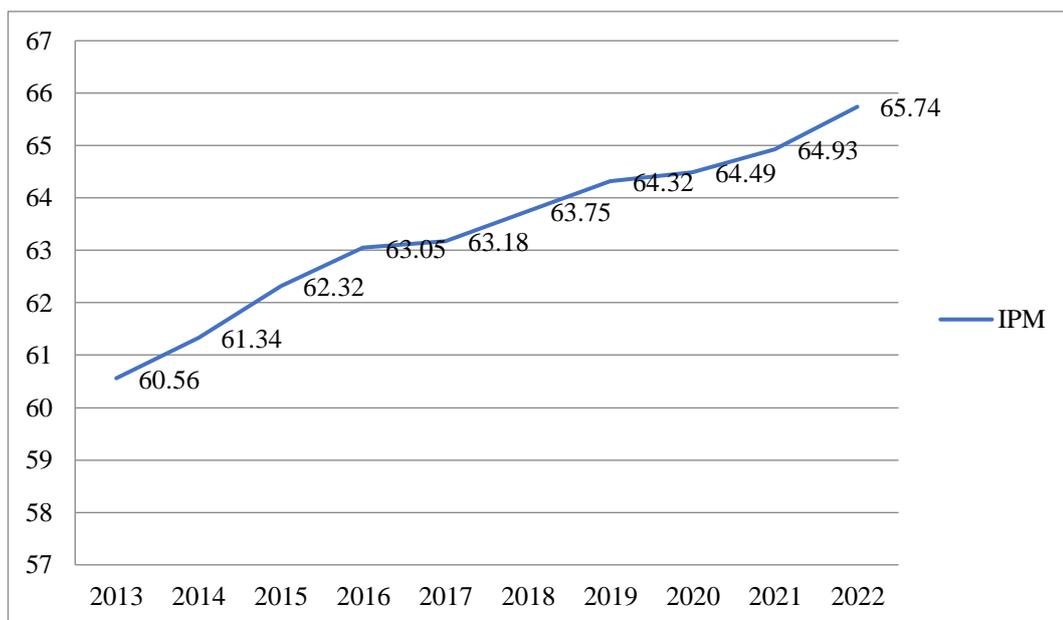
1.1 Latar Belakang

Kesejahteraan rakyat merupakan salah satu amanat Undang-Undang Dasar 1945. Oleh sebab itu, kesejahteraan menjadi fokus pembangunan pemerintah dengan tujuan terciptanya kehidupan masyarakat yang adil dan makmur. Kesejahteraan, sebagai salah satu instrumen pengukur keberhasilan pembangunan, memiliki beberapa indikator, yaitu kependudukan, kesehatan dan gizi, pendidikan, ketenagakerjaan, taraf dan pola konsumsi, perumahan dan lingkungan, kemiskinan, dan sosial lainnya (Budiati et al., 2021).

Keberhasilan pembangunan suatu wilayah diukur dengan beberapa parameter. Kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu bukti efektifitas pembangunan dengan dibuktikan beberapa indikator. Bagi suatu daerah, pengukuran kondisi dan kemajuan pembangunan daerah dapat dilakukan melalui penggunaan Indikator Pembangunan Daerah. Indikator ini pada dasarnya merupakan indikasi atau tanda-tanda umum tentang kondisi dan perkembangan dari sesuatu aspek pembangunan daerah. Indikator ini terdiri atas dua bagian yaitu Indikator Ekonomi Daerah dan Indikator kesejahteraan sosial. Adapun indikator kesejahteraan sosial adalah sebagai berikut: 1) Indeks Pembangunan Manusia; 2) *Gini Ratio*; 3) Tingkat Kemiskinan; dan 4) Tingkat Pengangguran (Siagian, 2012).

Keberhasilan pembangunan suatu wilayah untuk kesejahteraan masyarakat juga diukur dengan beberapa parameter lain, salah satunya adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Indeks* (HDI) (Maulana & Bowo, 2014). UNDP menyusun suatu indeks komposit yaitu IPM berdasarkan tiga indikator: angka harapan hidup pada waktu lahir (*life expectancy at birth*), angka melek huruf penduduk dewasa (*adult literacy rate*) dan rata-rata lama sekolah (*mean years of schooling*), dan kemampuan daya beli (*purchasing power parity*). Indikator angka harapan hidup mengukur kesehatan, indikator angka melek huruf penduduk dewasa dan rata-rata lama sekolah mengukur pendidikan dan terakhir indikator daya beli mengukur standar hidup (Bhakti et al., 2017).

Dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pada tahun 2010-2012 Kabupaten Musi Rawas berada pada kategori sedang. Berturut-turut sejak tahun 2010 IPM Kabupaten Musi Rawas adalah 59.69, 60.63, dan 61.37. Sedangkan Kabupaten Musi Rawas Utara sebagai Daerah Otonom Baru (DOB) yang berdiri tahun 2013, memiliki Indeks Pembangunan Manusia 60.56 (2013), 61.34 (2014), 62.32 (2015), 63.05 (2016), 63.18 (2017), 63.75 (2018), 64,32 (2019), 64.49 (2020), 64.93 (2021), dan 65.74 (2022). Berikut ini adalah data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Musi Rawas Utara berturut-turut sejak tahun 2013 (sejak berdiri). Dari grafik dibawah ini terlihat bahwa ada trend peningkatan Indeks Pembangunan Manusia setelah pemekaran wilayah.



Gambar 1.1 IPM Muratara 2013-2022

Sumber: BPS Musi Rawas Utara 2013-2022

Sebelum masa reformasi, seluruh tugas pokok dan fungsi *government* dipikul oleh pemerintah pusat, dengan sebuah sistem yang disebut sentralisasi. Pemerintah pusat mempunyai kewenangan penuh untuk mengatur jalannya pemerintahan daerah. Dampak dari sentralisasi ini jelas, ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat (Rasyid, 2002). Dalam sisi ekonomi, pemerintah sulit mengentaskan kemiskinan melalui pola sentralistik. Angka

kemiskinan pada Tahun 1999 berada pada angka 23.43 persen, sejak kebijakan desentralisasi, angka kemiskinan konstan menurun yaitu 19.14 persen (Tahun 2000), 18.41 persen (Tahun 2001), 18.20 persen (Tahun 2002), 17.42 persen (Tahun 2003), dan 16.66 (Tahun 2004) (Usman et al., 2005).

Kesulitan ini terjadi karena kebijakan pemerintah pusat tidak menyentuh langsung kepada masyarakat, terutama yang berada di pedesaan. Kebijakan juga belum berlandaskan kebutuhan rakyat (*people need*) karena jauhnya jangkauan dan banyaknya jumlah penduduk. Oleh karena itu, penyerahan kebijakan kepada Pemerintah Daerah merupakan sebuah solusi agar mampu menciptakan kebijakan yang menyeluruh, adil, dan berkelanjutan.

Berangkat dari persoalan-persoalan tersebut serta semangat untuk melakukan perubahan akan keberadaan sistem pemerintah di daerah, maka muncullah berbagai keinginan, pendapat, gagasan tuntutan reformasi dari berbagai kalangan masyarakat Indonesia. Tuntutan untuk mengatur diri sendiri dalam rangka peningkatan kesejahteraan sebagai ruh otonomi daerah terus disampaikan oleh masyarakat daerah. Salah satu diantara daerah ini adalah Musi Rawas Utara provinsi Sumatera Selatan yang menghendaki perubahan agar daerahnya dibentuk menjadi sebuah kabupaten pemekaran.

Keinginan masyarakat agar terjadinya pemekaran ialah untuk mempermudah urusan birokrasi dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mengingat kondisi daerah yang banyak terisolasi dari program pembangunan. Selain itu sarana transportasi yang terbatas, dikelilingi oleh sungai dan hutan pedalaman yang sulit ditempuh, sehingga program peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak berjalan dengan efektif.

Pada tahun 2013, tercatat jumlah penduduk miskin di Kabupaten Musi Rawas adalah 17,85 persen (98,8 ribu jiwa) dari jumlah total penduduk (*Indikator Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013*, 2013). Dilihat dari keseluruhan Kabupaten/Kota yang ada di Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Rawas menempati peringkat ketiga dalam hal jumlah penduduk miskin terbanyak.

Akhirnya setelah beberapa tahun perjuangan, pada tanggal 11 Juni 2013 DPRI dipimpin Marzuki Alie secara resmi menetapkan Musi Rawas Utara sebagai kabupaten baru di Sumatera Selatan. Musi Rawas Utara menempati peringkat sebagai kabupaten termuda ke 17 di Sumatera Selatan setelah kabupaten Lemajang Ilir (Pemerintahan Kabupaten Musi Rawas Utara, 2013).

Jumlah penduduk Kabupaten Musi Rawas Utara pada Tahun 2014 adalah 180.267 jiwa, meningkat menjadi 194.405 jiwa pada Tahun 2020. Jumlah penduduk terbanyak berada pada kecamatan Rupit, dengan 37.221 jiwa pada Tahun 2020 (Badan Pusat Statistik Kabupaten Musi Rawas Utara, 2020). Setengah dari keseluruhan wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara adalah kawasan hutan yang terdiri dari hutan suaka, hutan lindung, dan hutan pengelolaan. Hal ini menjadikan mayoritas penduduk Musi Rawas Utara bergerak dibidang pertanian dan perkebunan. Potensi besar Kabupaten Musi Rawas Utara lainnya adalah pertambangan seperti batubara, minyak bumi dan gas, serta emas. Kekayaan alam ini juga yang melandasi masyarakat untuk mekar dari Kabupaten Musi Rawas agar bisa mengelola kekayaan alamnya secara otonom.

Kabupaten Musi Rawas Utara sebagai Daerah Otonom Baru (DOB), menunjukkan peningkatan pembangunan yang cukup baik. Dilihat dari angka pengeluaran perkapita, Tahun 2013 adalah 8.823,03 rupiah, sedangkan pada Tahun 2021, meningkat signifikan yaitu 9.885,00 rupiah (Badan Pusat Statistik Kabupaten Musi Rawas Utara, 2021).

Sekarang kabupaten Musi Rawas Utara telah memiliki Bupati dan Wakil Bupati yaitu H. Devi Suhartoni dan Inayatullah untuk periode 2020-2025, berdasarkan hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2020 (*Hasil Pemilukada Musi Rawas Utara, 2020*). Demikian pula, kabupaten tersebut telah dilengkapi dengan sejumlah sarana dan prasarana sebagai prasyarat untuk menata, mengembangkan dan meningkatkan pelayanan publik serta pembangunan di segala bidang bersama seluruh komponen masyarakat guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasca reformasi adalah fase baru dalam tatanan sistem pemerintahan Indonesia. Salah satu perubahan nyata setelah reformasi adalah bergantinya paradigma sentralisasi menjadi desentralisasi untuk mewujudkan *good governance*. Desentralisasi adalah penyerahan kewenangan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah atau lebih dikenal otonomi daerah. Tonggak awal berlakunya otonomi daerah adalah lahirnya Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 yang saat ini telah direvisi melalui Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah mengakibatkan perubahan paradigma pemerintahan yang sebelumnya tersentralisasi menjadi pemerintahan yang terdesentralisasi.

Wujud desentralistik dalam praktiknya yaitu pemerintah daerah yang memiliki otonomi dalam menjalankan urusan rumah tangga lokalnya sesuai kewenangan yang diberikan oleh undang-undang (Hasyim Zoem, 2017). Wujud desentralistik yaitu salah satunya pemekaran wilayah. Pemekaran wilayah Indonesia, merupakan hal yang di amanatkan oleh Undang-Undang tentang pembentukan wilayah administratif baru ditingkat Provinsi, Kota, dan Kabupaten berdasarkan UU No 22 tahun 1999 yang kemudian secara normatif direvisi menjadi UU No 32 tahun 2004 pemekaran wilayah secara intensif berkembang di Indonesia sebagai salah satu jalan untuk pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.(Kaputra & Simanjuntak, 2013)

Pembentukan suatu daerah dalam struktur Negara Indonesia, pada dasarnya sebagai subsistem yang dimaksudkan demi meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, salah satunya ditujukan untuk memacu pertumbuhan ekonomi daerah serta pemerataan pembangunan.(Marbun, 2010)

Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan menganut asas desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 antara lain menyatakan bahwa pembagian Daerah Indonesia atas Daerah Besar dan Kecil dengan bentuk dan susunannya ditetapkan dengan undang-undang dengan memandang dan

mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal-usul dalam daerah yang bersifat istimewa.

Berdasarkan UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pembentukan daerah pada dasarnya bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pembentukan daerah dapat berupa pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih, atau penggabungan bagian daerah yang bersandingan, atau penggabungan beberapa daerah. Pemekaran daerah atau pembentukan daerah otonom baru mulai banyak dilakukan pasca 1999 atau mulai era reformasi. Selama periode Orde Baru tahun 1966 – 1998 tidak terdapat penambahan daerah otonom baru yang signifikan.

Pemekaran wilayah merupakan salah satu wujud dari upaya pemerintah untuk memberikan pelayanan yang lebih maksimal bagi masyarakat. Sehingga diharapkan, dengan adanya pemekaran wilayah masyarakat mendapatkan pelayanan yang lebih baik, karena pelayanan langsung dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Salah satu dampak pemekaran wilayah terhadap kualitas pelayanan publik dalam pengurusan perizinan dan non-perizinan adalah meningkatnya kepuasan masyarakat karena pelayanan telah mengikuti *Standard Operating Procedure* yang sesuai, sehingga antrian menjadi lebih singkat dan efisien (Nikasari, 2019).

Dengan semangat otonomi daerah muncul lah wacana-wacana melakukan pemekaran wilayah, yang dapat mempercepat pelaksanaan pembangunan, meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemekaran wilayah harus benar-benar dilakukan untuk mendekatkan pelayanan pemerintah pada masyarakat dan memperpendek alur pelayanan sehingga akan tercipta pelayanan berkualitas yang ditunjukkan dengan kemajuan suatu daerah otonom.

Kebijakan otonomi daerah telah memberikan peluang yang besar bagi daerah untuk mengelola dan mengembangkan daerah berdasarkan potensi yang dimilikinya sesuai dengan aspirasi dan inisiatif masing-masing daerah. Dengan kewenangan yang diberikan pemerintah pusat kepada daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri berarti juga daerah tersebut berusaha untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam upaya mengelola dan mengembangkan daerah agar dapat lebih maju dari sebelumnya.

Dampak dari pemekaran dapat dilihat dari jumlah ketersediaan sarana sosial dan ekonomi yaitu aspek pendidikan, kesehatan, dan sarana jalan yang cukup meningkat dari sebelum pemekaran, selain itu sarana pemerintahan pun juga meningkat (Nasria, 2018). Selain itu, pemekaran mempercepat proses pembangunan dalam rangka pemerataan dan memutus keterisoliran penduduk yang berada di daerah pedalaman (Lariki, 2012). Pemerintah sebagai *policy maker* mempunyai peran yang sangat krusial dalam pembangunan suatu wilayah. Pemerintah memiliki beberapa fungsi dalam hal pembangunan, yaitu: 1) fungsi regulasi; 2) fungsi pelayanan kepada masyarakat; 3) fungsi pemberdayaan asset dan kekayaan negara; dan 4) fungsi keamanan atau perlindungan. (Rewansyah, 2010)

Berdasarkan fungsi yang telah disebutkan di atas, maka selayaknya pemerintah selalu mengupayakan solusi yang konkret bagi setiap permasalahan terkait masyarakat, termasuk dalam hal kesejahteraan masyarakat yang menjadi salah satu indikator keberhasilan pembangunan secara keseluruhan atau komprehensif. Berangkat dari beberapa penelitian diatas, pemekaran wilayah memberikan dampak positif terhadap pembangunan yang berorientasi kepada kesejahteraan masyarakat. Namun, melihat keadaan masyarakat Kabupaten Musi Rawas Utara perlu diadakan penelitian lebih lanjut bagaimana perbedaan kesejahteraan masyarakat sebelum dan sesudah pemekaran wilayah pada aspek ekonomi, Pendidikan, Kesehatan, dan sosial.

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan diatas, maka peneliti tertarik untuk menjadikannya sebagai pembahasan dalam sebuah tesis yang berjudul

“Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Musi Rawas Utara”

1.2 Rumusan Masalah

Sebagai bagian dari upaya pemerataan pembangunan, desentralisasi memberikan konsep pemerintahan yang diatur secara otonom oleh Pemerintah Daerah. Desentralisasi kemudian juga menimbulkan upaya pemekaran wilayah pada beberapa daerah yang dianggap memerlukan pemekaran. Sebagai Daerah Otonom Baru (DOB), Kabupaten Musi Rawas Utara yang dimekarkan dari Kabupaten Musi Rawas diharapkan mampu mengoptimalkan pembangunan demi terwujudnya kesejahteraan yang merata. Kesejahteraan yang dimaksud mencakup aspek ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan sosial.

Berdasarkan uraian yang dijelaskan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- 1.2.1 Bagaimana dampak pemekaran wilayah terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Musi Rawas Utara dilihat dari indikator ekonomi?
- 1.2.2 Bagaimana dampak pemekaran wilayah terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Musi Rawas Utara dilihat dari indikator kesehatan?
- 1.2.3 Bagaimana dampak pemekaran wilayah terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Musi Rawas Utara dilihat dari indikator pendidikan?
- 1.2.4 Bagaimana dampak pemekaran wilayah terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Musi Rawas Utara dilihat dari indikator sosial?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat sesudah adanya pemekaran Kabupaten Musi Rawas Utara dari Kabupaten Musi Rawas. Sedangkan secara khusus, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Musi Rawas Utara pasca pemekaran wilayah berdasarkan indikator sebagai berikut:

- 1.3.1 Tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Musi Rawas Utara sebelum dan setelah pemekaran dilihat dari indikator ekonomi

- 1.3.2 Tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Musi Rawas Utara sebelum dan setelah pemekaran dilihat dari indikator kesehatan
- 1.3.3 Tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Musi Rawas Utara sebelum dan setelah pemekaran dilihat dari indikator pendidikan
- 1.3.4 Tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Musi Rawas Utara sebelum dan setelah pemekaran dilihat dari indikator sosial

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis:

- 1) Menambah wawasan mengenai dampak pemekaran wilayah terhadap kesejahteraan masyarakat Kabupaten Musi Rawas Utara.
- 2) Memberikan bahan informasi ilmiah penelitian yang mengkaji otonomi daerah, pemekaran wilayah dan kesejahteraan masyarakat yang diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran mengenai persoalan pemerintah daerah.

1.4.2 Manfaat praktis

- 1) Bagi peneliti: Untuk menambah wawasan tentang dampak pemekaran wilayah, serta dapat mengaplikasikan teori-teori yang ada.
- 2) Bagi akademik: Sebagai sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang kesejahteraan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap daerahnya guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah khususnya.
- 3) Bagi pemerintah: Sebagai bahan pemikiran serta pertimbangan pemerintah terhadap masyarakat di daerah dalam mengeluarkan kebijakan pemekaran suatu wilayah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1. Kesejahteraan

2.1.1.1 Konsep Dasar Kesejahteraan

Kesejahteraan merupakan suatu keadaan terpenuhinya kebutuhan hidup yang layak bagi masyarakat, sehingga mampu mengembangkan diri dan dapat melaksanakan fungsi sosialnya yang dapat dilakukan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009, 2009).

Kesejahteraan merupakan suatu hal yang bersifat subjektif, sehingga setiap keluarga atau individu di dalamnya yang memiliki pedoman, tujuan, dan cara hidup yang berbeda akan memberikan nilai yang berbeda tentang faktor-faktor yang menentukan tingkat kesejahteraan (Kuswardinah, 2017). Kesejahteraan menurut Badan Pusat Statistik adalah suatu kondisi dimana seluruh kebutuhan jasmani dan rohani dari rumah tangga tersebut dapat dipenuhi sesuai dengan tingkat hidup. Status kesejahteraan dapat diukur berdasarkan proporsi pengeluaran rumah tangga. Rumah tangga dapat dikategorikan sejahtera apabila proporsi pengeluaran untuk kebutuhan pokok sebanding atau lebih rendah dari proporsi pengeluaran untuk kebutuhan bukan pokok. Sebaliknya rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk kebutuhan pokok lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran untuk kebutuhan bukan pokok, dapat dikategorikan sebagai rumah tangga dengan status kesejahteraan yang masih rendah.

Kesejahteraan adalah sebuah tata kehidupan dan penghidupan sosial, material, maupun spiritual yang diikuti dengan rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman diri, rumah tangga serta masyarakat lahir dan batin yang memungkinkan setiap warga negara dapat melakukan usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya

bagi diri sendiri, rumah tangga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi (Rambe, 2004).

2.1.1.2 Kesejahteraan Keluarga

Kesejahteraan dapat pula dilihat dari komunitas terkecil masyarakat yakni keluarga. Kesejahteraan keluarga adalah terciptanya suatu keadaan yang harmonis dan terpenuhinya kebutuhan jasmani serta sosial bagi anggota keluarga, tanpa mengalami hambatan-hambatan yang serius di dalam lingkungan keluarga, dan dalam menghadapi masalah-masalah keluarga akan mudah untuk di atasi secara bersama oleh anggota keluarga, sehingga standar kehidupan keluarga dapat terwujud.

Konsep Keluarga Sejahtera menurut Undang-Undang No. 10 tahun 1992 adalah keluarga yang dibentuk atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan spiritual dan materiil yang layak, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antar anggota dan antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungannya.

BKKBN merumuskan pengertian keluarga sejahtera sebagai keluarga yang dapat memenuhi kebutuhan anggotanya baik kebutuhan sandang, pangan, perumahan, sosial dan agama, keluarga yang mempunyai keseimbangan antara penghasilan keluarga dengan jumlah anggota keluarga, keluarga yang dapat memenuhi kebutuhan kesehatan anggota keluarga, kehidupan bersama dengan masyarakat sekitar, beribadah khusyuk di samping terpenuhinya kebutuhan pokok.

1. Tahapan Keluarga Pra Sejahtera (KPS) Yaitu keluarga yang tidak memenuhi salah satu dari 6 (enam) indikator Keluarga Sejahtera I (KS I) atau indikator “kebutuhan dasar keluarga” (*basic needs*).
2. Tahapan Keluarga Sejahtera I (KSI) Yaitu keluarga mampu memenuhi 6 (enam) indikator tahapan KS I, tetapi tidak memenuhi salah satu dari 8 (delapan) indikator Keluarga Sejahtera II atau indikator “kebutuhan psikologis” (*psychological needs*) keluarga.

3. Tahapan Keluarga Sejahtera II Yaitu keluarga yang mampu memenuhi 6 (enam) indikator tahapan KS I dan 8 (delapan) indikator KS II, tetapi tidak memenuhi salah satu dari 5 (lima) indikator Keluarga Sejahtera III (KS III), atau indikator “kebutuhan pengembangan” (*develomental needs*) dari keluarga.
4. Tahapan Keluarga Sejahtera III Yaitu keluarga yang mampu memenuhi 6 (enam) indikator tahapan KS I, 8 (delapan) indikator KS II, dan 5 (lima) indikator KS III, tetapi tidak memenuhi salah satu dari 2 (dua) indikator Keluarga Sejahtera III Plus (KS III Plus) atau indikator “aktualisasi diri” (*self esteem*) keluarga.
5. Tahapan Keluarga Sejahtera III Plus Yaitu keluarga yang mampu memenuhi keseluruhan dari 6 (enam) indikator tahapan KS I, 8 (delapan) indikator KS II, 5 (lima) indikator KS III, serta 2 (dua) indikator tahapan KS III Plus.

Keluarga Sejahtera I: Pada umumnya anggota keluarga makan dua kali sehari atau lebih, anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk di rumah, bekerja/sekolah dan bepergian, rumah yang ditempati keluarga mempunyai atap, lantai dan dinding yang baik.

Bila ada anggota keluarga sakit dibawa ke sarana kesehatan, bila pasangan usia subur ingin ber KB pergi ke sarana pelayanan kontrasepsi, dan semua anak umur 7—15 tahun dalam keluarga bersekolah.

Keluarga Sejahtera II: Pada umumnya anggota keluarga melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, paling kurang sekali seminggu seluruh anggota keluarga makan daging/ikan/telur, Seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu setelan pakaian baru dalam setahun, luas lantai rumah paling kurang 8 m² untuk setiap penghuni rumah, Tiga bulan terakhir keluarga dalam keadaan sehat sehingga dapat melaksanakan tugas/fungsi masing-masing, ada seorang atau lebih anggota keluarga yang bekerja untuk memperoleh penghasilan, seluruh anggota keluarga umur 10 – 60 tahun bisa baca

tulisan latin, Pasangan usia subur dengan anak dua atau lebih menggunakan alat/obat kontrasepsi.

Dalam pandangan sistem, kesejahteraan dapat diposisikan sebagai output/hasil dari sebuah proses pengelolaan input (sumberdaya) yang tersedia, dimana kesejahteraan sebagai output pada suatu titik dapat menjadi sumberdaya atau input untuk diproses menghasilkan tingkat kesejahteraan keluarga pada tahap berikutnya. Kesejahteraan keluarga pada hakikatnya mempunyai dua dimensi yaitu dimensi material dan spiritual.

Kesejahteraan keluarga juga dapat dibedakan menjadi kesejahteraan ekonomi (*family wellbeing*) yang diukur dari pemenuhan input keluarga (misalnya diukur dari pendapatan, upah, *asset*, dan pengeluaran keluarga) dan kesejahteraan material (*family material well-being*) yang diukur dari berbagai bentuk barang dan jasa yang diakses oleh keluarga. Pengukuran kesejahteraan material relatif lebih mudah dan akan menyangkut pemenuhan kebutuhan keluarga yang berkaitan dengan materi, baik sandang, pangan, dan papan, serta kebutuhan keluarga yang dapat diukur dengan materi. Secara umum, pengukuran kesejahteraan material ini dapat dilakukan dengan mengukur tingkat pendapatan. Menurut Santamarina dalam (Sunarti, 2006), terdapat enam kategori kesejahteraan (*quality of life atau individual well-being*) yaitu: 1) fisik, 2) psikologis, 3) tingkat kemandirian, 4) sosial, 5) lingkungan, dan 6) spiritual.

Kesejahteraan Ekonomi. Kesejahteraan ekonomi sebagai tingkat terpenuhinya input secara finansial oleh keluarga. Input yang dimaksud baik berupa pendapatan, nilai aset keluarga, maupun pengeluaran, sementara indikator output memberikan gambaran manfaat langsung dari investasi tersebut pada tingkat individu, keluarga dan penduduk (Sumarwan & Hira, n.d.). Kesejahteraan ekonomi dari suatu keluarga biasanya didefinisikan sebagai tingkat kepuasan atau tingkat pemenuhan kebutuhan yang diperoleh oleh rumah tangga (Park & Kim, 2002).

Dalam pembahasan perilaku ekonomi RT, tujuan dari pengelolaan ekonomi RT adalah kepuasan dan kemanfaatan atau kegunaan (*utility*). Kepuasan dan manfaat merupakan istilah lain dari kesejahteraan (*well-being*) yang sering digunakan sosiologi dan home-ekonomist namun mengacu kepada hal yang sama. Analisis perilaku ekonomi membahas bagaimana pengelolaan sumber daya rumah tangga, materi dan waktu, pengeluaran untuk berbagai kepentingan (konsumsi pangan, kesehatan, pendidikan, liburan) untuk senantiasa menjaga keseimbangan (*equilibrium*) rumah tangga.

Kesejahteraan Sosial. Beberapa komponen dari kesejahteraan sosial diantaranya adalah penghargaan (*self esteem*) dan dukungan sosial. Menurut Chess & Thomas, (1987) seperti dikutip (Ashworth & Saxton, 2006), penghargaan merupakan pusat pengembangan manusia agar berfungsi secara optimal, kreatif, produktif, terampil, dan optimis. Sedangkan dukungan sosial secara luas diketahui sebagai faktor penting bagi kesejahteraan wanita menikah, termasuk didalamnya kesejahteraan ibu hamil.

Kesejahteraan psikologi. Kesejahteraan psikologi merupakan fenomena multidimensi yang terdiri dari fungsi emosi dan fungsi kepuasan hidup (Gauvin & Spence, 1996). Terdapat tiga dimensi kesejahteraan psikologi dalam kaitannya dengan peran orangtua yaitu; 1) suasana hati, 2) tingkat kepuasan, dan 3) arti hidup (Umberson & Gove, 1989). Komponen kesejahteraan psikologi yang paling sering diteliti dalam kaitannya dengan aspek lain adalah suasana hati, kecemasan, depresi, harga diri, dan konsep diri (Gauvin & Spence, 1996). Irwanto, dkk (1997) meneliti kesejahteraan psikologi wanita akseptor KB, dengan menggunakan beberapa komponen kesejahteraan psikologi diantaranya adalah: 1. Stress pribadi meliputi: konflik, perasaan bersalah, ketidakberdayaan menghadapi masalah pribadi, marah terhadap diri sendiri, marah terhadap orang lain, kebutuhan dukungan atau pertolongan, tidak ada yang menolong, dan ketidakpastian terhadap masa depan. 2. Kepuasan dalam berhubungan meliputi:

hubungan dengan keluarga luas, dengan anak, dengan suami, dengan teman dan tetangga, hubungan seksual, dan hubungan dengan yang maha kuasa. 3. Kepuasan terhadap kesejahteraan keluarga meliputi: pendapatan keluarga, kemampuan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, kepuasan terhadap hidup keseluruhan, kemampuan untuk mengelola keluarga 4. Tekanan peran meliputi: peran dan tanggungjawab sebagai ibu, sebagai istri, serta kekecewaan dengan kehidupan keluarga 5. Perawatan anak dan tanggung jawab rumah tangga meliputi: masalah perkawinan sehubungan dengan perawatan anak dan pekerjaan rumah tangga, suami tidak mengerti masalah istri, tidak dapat mengunjungi sanak keluarga sehubungan dengan perawatan anak, beban tanggung jawab rumah tangga, serta kesulitan dalam perawatan anak.

Selain itu, konsep kesejahteraan dapat dikaitkan dengan *needs*. Abraham Maslow membuat diagram segitiga yang berisikan hierarki kebutuhan manusia. Dalam teori ini memuat lima tingkatan kebutuhan yang harus terpenuhi di masing-masing tingkatannya. Tingkatan kebutuhan tersebut diawali dengan kebutuhan dasar seperti kebutuhan fisiologi manusia, kebutuhan rasa aman, kebutuhan merasakan kasih sayang, kebutuhan mendapatkan pencapaian, dan tingkat paling atas adalah kebutuhan mengaktualisasikan diri. Hierarki kebutuhan ini dibentuk dalam bentuk segitiga dengan bagian dasarnya memiliki cakupan aspek yang lebih luas dibanding bagian kerucutnya.

Teori kesejahteraan dibagi menjadi tiga bagian yakni: (1) *Classical utilitarian*, dimana pendekatan ini menekankan bahwa kesenangan atau kepuasan seseorang dapat diukur. Prinsip bagi individu adalah meningkatkan sebanyak mungkin tingkat kesejahteraannya. Sedangkan bagi masyarakat, peningkatan kesejahteraan kelompoknya merupakan prinsip yang dipegang dalam kehidupannya; (2) *Neoclassical welfare theory*, dimana fungsi kesejahteraan merupakan fungsi dari semua kepuasan individu; (3) *New contraction approach* yang mengangkat adanya kebebasan maksimum dalam hidup individu atau seseorang.

Penekanan dalam pendekatan ini adalah individu akan memaksimalkan kebebasannya untuk mengejar barang dan jasa tanpa ada campur tangan dari pihak tertentu (Boorse, 2012).

Todaro (2012) menyebutkan bahwa indikator kesejahteraan daerah diukur melalui tingkat kemiskinan, angka buta huruf, angka melek huruf, kerusakan alam dan lingkungan, polusi air dan tingkat produk domestik bruto. Kesejahteraan suatu wilayah ditentukan dari ketersediaan sumber daya manusia, fisik, dan sumber daya lainnya. Sumberdaya tersebut berinteraksi dalam proses pembangunan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Selanjutnya Todaro menyebutkan kesejahteraan masyarakat menengah ke bawah dapat ditandai oleh terentaskannya kemiskinan, tingkat kesehatan yang baik, perolehan tingkat pendidikan yang tinggi, dan peningkatan produktivitas masyarakat.

Kajian yang dilakukan oleh Deaton (2003) menunjukkan bahwa distribusi pendapatan merupakan kewenangan dimiliki oleh pemerintah dan sangat berdampak pada tingkat kesejahteraan. Distribusi pendapatan yang tidak seimbang akan menciptakan ketimpangan, sehingga mengakibatkan sebagian masyarakat tidak dapat menjangkau kebutuhan dasar. Deaton juga menyebutkan bahwa kesejahteraan masyarakat diukur dengan tingkat pendapatan, pemenuhan kebutuhan dasar akan makanan dan kesehatan.

2.1.13 Indeks Pembangunan Manusia

United Nation Development Program (UNDP) mendefinisikan pembangunan manusia sebagai suatu “proses untuk memperluas pilihan-pilihan bagi penduduk” (*Human Development Report*, 2001), dalam arti bahwa manusia diberi pilihan yang lebih banyak dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang menyangkut ekonomi, sosial, dan budaya. Terdapat tiga hal yang dianggap penting dalam pemilihan yang dilakukan oleh manusia, yaitu memiliki kehidupan yang panjang dan sehat, untuk

memperoleh ilmu pengetahuan dan memiliki akses terhadap sumber daya yang diperlukan, untuk mendapat standar hidup yang layak.

Apabila tiga faktor kritis tersebut tidak dipenuhi maka, banyak pilihan lainnya yang tidak akan dapat dicapainya, misalnya kemerdekaan politik, ekonomi, sosial, serta kesempatan untuk memperoleh tingkat produktivitas yang tinggi, menikmati rasa terhormat dan hak-hak azasi manusia. Konsep pembangunan manusia dalam pengertian di atas jauh lebih luas daripada teori pembangunan ekonomi yang konvensional, termasuk model pertumbuhan ekonomi, pembangunan sumber daya manusia (SDM), pendekatan kesejahteraan, dan pendekatan kebutuhan kebutuhan dasar manusia. Model pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan peningkatan pendapatan dan produksi nasional (GNP). Pembangunan SDM menempatkan manusia terutama sebagai input dari proses produksi (sebagai suatu sarana bukan tujuan). Pendekatan kesejahteraan melihat manusia sebagai pemanfaat (*beneficiaries*) bukan sebagai objek perubahan. Pendekatan kebutuhan-kebutuhan dasar memfokuskan pada penyediaan barang dan jasa kebutuhan hidup.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan suatu indeks komposit yang juga merupakan indikator yang dapat menggambarkan perkembangan pembangunan manusia secara terukur dan representative. IPM diperkenalkan pertama kali pada tahun 1990 oleh UNDP. Menurut BPS (2009), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan ukuran capaian pembangunan berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Indeks Pembangunan Manusia dihitung berdasarkan data yang dapat menggambarkan ke empat komponen, yaitu angka harapan hidup yang mengukur keberhasilan dalam bidang kesehatan, angka melek huruf dan rata – rata lamanya bersekolah yang mengukur keberhasilan dalam bidang pendidikan, dan kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata – rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mengukur keberhasilan dalam bidang pembangunan untuk hidup layak.

Nilai IPM suatu negara atau wilayah menunjukkan seberapa jauh negara atau wilayah itu telah mencapai sasaran yang ditentukan yaitu angka harapan hidup 85 tahun, pendidikan dasar bagi semua lapisan masyarakat (tanpa kecuali), dan tingkat pengeluaran dan konsumsi yang telah mencapai standar hidup layak. Semakin dekat nilai IPM suatu wilayah terhadap angka 100, semakin dekat jalan yang harus ditempuh untuk mencapai sasaran itu.

Penghitungan IPM sebagai indikator pembangunan manusia memiliki tujuan penting, diantaranya: a) Membangun indikator yang mengukur dimensi dasar pembangunan manusia dan perluasan kebebasan memilih. b) Memanfaatkan sejumlah indikator untuk menjaga ukuran tersebut sederhana. c) Membentuk satu indeks komposit dari pada menggunakan sejumlah indeks dasar. d) Menciptakan suatu ukuran yang mencakup aspek sosial dan ekonomi. Dalam indeks pembangunan manusia terdapat tiga komposisi indikator yang digunakan untuk mengukur besar indeks pembangunan manusia suatu negara, yaitu: 1). Tingkat kesehatan diukur harapan hidup saat lahir 2). Tingkat pendidikan diukur dengan jumlah penduduk yang melek huruf atau tingkat pendidikan yang telah dicapai atau lamanya pendidikan seorang penduduk. 3). Standar kehidupan diukur dengan tingkat pengeluaran perkapita per tahun.

IPM merupakan rata-rata dari ketiga komponen tersebut, dengan rumus:

$$\text{IPM} = (\text{X1} + \text{X2} + \text{X3}) / 3$$

Dimana:

X1 = Angka harapan hidup

X2 = Tingkat pendidikan

X3 = Tingkat kehidupan yang layak

2.1.2 Desentralisasi dan Otonomi Daerah

2.1.2.1 Pengertian Desentralisasi

Desentralisasi adalah jantung dari agenda reformasi kebijakan di seluruh dunia. Negara-negara seperti Meksiko, Mesir, Ghana, dan India telah memiliki kebijakan yang berbasis desentralisasi pada program pemerintahan yang membuat pelayanan administrasi di negara tersebut lebih efektif, efisien, dan responsif (Faguet & Pöschl, 2015).

Ketika interaksi ekonomi internasional tumbuh lebih cepat dan masyarakat menjadi lebih kompleks serta saling berhubungan, pemerintah mulai dilihat sebagai satu-satunya pengambil kebijakan. Meskipun lembaga pemerintahan adalah yang terpenting, fakta bahwa kehidupan masyarakat juga dibentuk oleh keputusan yang dibuat oleh pengusaha perorangan, perusahaan keluarga, dan perusahaan swasta; oleh perusahaan multinasional dan lembaga keuangan internasional; dan oleh berbagai organisasi masyarakat sipil yang beroperasi baik di dalam maupun di luar wilayah nasional, menjadi lebih nyata (Rondinelli, 1981).

Dari perspektif yang lebih luas tentang pemerintahan ini, konsep-konsep baru desentralisasi juga muncul. Ketika konsep pemerintahan menjadi lebih inklusif, desentralisasi akan memiliki makna dan bentuk baru. Desentralisasi bertransformasi dan berevolusi secara konsep dan praktik, mulai dari transfer wewenang didalam pemerintahan hingga pembagian kekuasaan, wewenang, dan tanggung jawab di antara lembaga-lembaga pemerintahan yang lebih luas (Cheema & Rondinelli, 2007).

Menurut Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999, “Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Kewenangan yang diserahkan tersebut, mencakup semua kewenangan bidang pemerintahan, kecuali kewenangan politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lainnya yang akan ditetapkan dalam peraturan pemerintah (Saragih, 2003).

Desentralisasi dapat memberi sisi positif dalam pelaksanaan pemerintahan sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah pusat desentralisasi tentu akan menjadi jalan yang mengurangi beban pusat.
2. Program atau rencana-rencana pembangunan yang hendak diwujudkan akan lebih realistis, lebih mengena dan lebih dekat dengan kebutuhan lokal.
3. Memberi kesempatan kepada pemerintah daerah untuk belajar mengurus rumah tangganya sendiri dan dengan demikian belajar untuk bisa menangkap dan merumuskan aspirasi masyarakat setempat.
4. Dengan adanya pemberian kewenangan maka berarti akan membuka peluang bagi keterlibatan rakyat dalam mengontrol jalannya pemerintahan (Agusniar, 2006).

2.1.2.2 Pengertian Otonomi Daerah

Pengertian “otonomi daerah” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti bahwa hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengertian ini ternyata tidak berbeda dengan pasal 1 huruf c UU No.32 Tahun 2004.

Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengertian itu tidak terlepas dari pengertian otonomi yang dalam konteks politik dan pemerintahan mengandung makna pemerintahan sendiri. Kata “Otonomi” berasal dari kata “otonom” yang mempunyai dua pengertian. Pertama, berdiri sendiri; dengan pemerintahan sendiri dan daerah otonom. Kedua, kelompok sosial yang memiliki hak dan kekuasaan menentukan arah tindakannya sendiri. R.D.H. Koesomahatmadja berpendapat bahwa diberikannya “hak dan kekuasaan” perundangan dan pemerintahan kepada daerah otonom seperti provinsi dan kabupaten/kota, maka daerah tersebut dengan inisiatifnya sendiri dapat

mengurus rumah tangga daerahnya. Untuk mengurus rumah tangga daerah tersebut dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu: Pertama, membuat produk-produk hukum daerah yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar maupun perundang-undangan lainnya. Kedua, menyelenggarakan kepentingan-kepentingan umum. Pengertian otonomi menurut UU No. 32 tahun 2004 dibedakan dengan pengertian desentralisasi. Karena pada pengertian otonomi mengandung unsur “kewenangan untuk mengatur” atau dengan kata lain terkandung juga pengertian kemandirian. Mengacu pada definisi normatif dalam UU No. 32 Tahun 2004, maka unsur otonomi daerah adalah hak dan wewenang.

Tujuan otonomi daerah, berdasarkan pasal 2 ayat (3) UU No. 32 Tahun 2004 adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah. Prinsip otonomi daerah yang dianut oleh UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah adalah otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, maka memberikan kewenangan yang lebih banyak kepada daerah Kabupaten/Kota yang didasarkan atas asas desentralisasi.

Kewenangan otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam penjelasan umum UU No. 32 Tahun 2004:

- a. Otonomi luas adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintah yang mencakup kewenangan semua bidang kecuali kewenangan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, peradilan, moneter, fiskal, agama serta kewenangan bidang lainnya, yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. disamping itu keleluasaan otonomi daerah mencakup pula kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengadilan dan evaluasi.
- b. Otonomi nyata adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintah di bidang tertentu yang secara nyata dan diperlukan serta tumbuh dan berkembang di daerah.

- c. Otonomi yang bertanggungjawab adalah merupakan perwujudan pertanggung jawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan berkembang di daerah.

2.1.3 Pemekaran Wilayah

2.1.3.1 Pengertian dan Latar Belakang

Pemekaran wilayah pada dasarnya dilandasi oleh teori tentang lokasi dan wilayah. Teori lokasi dan wilayah berhubungan dengan keruangan (Tarigan, 2005). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pemekaran wilayah sebagai suatu proses pemecahan wilayah (dari satu wilayah membentuk wilayah lain) memiliki sifat-sifat keruangan. Mengacu dari teori lokasi dan wilayah tersebut, ide dasar dari konsep pemekaran wilayah pada umumnya lebih banyak dipengaruhi dan diadopsi dari teori lokasi pusat (*central place theory*). Teori lokasi pusat pertama kali di kemukakan oleh Walter Christaller tahun 1933, kemudian diperluas dan dikembangkan oleh August Losch tahun 1940.

Pemekaran daerah di Indonesia adalah pembentukan wilayah administratif baru di tingkat provinsi maupun kota dan kabupaten dari induknya, landasan hukum terbaru untuk pemekaran daerah di Indonesia adalah UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah UUD 1945 tidak mengatur perihal pembentukan daerah atau pemekaran suatu wilayah secara khusus, namun disebutkan dalam pasal 18 B ayat (1): “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang”. Selanjutnya, pada ayat (2) pasal tersebut tercantum kalimat “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan”. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007, pemekaran daerah/wilayah adalah pemecahan suatu pemerintah baik provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan menjadi dua daerah atau lebih.

Menurut peraturan pemerintah No 129 Tahun 2000, tentang persyaratan pembentukan dan kriteria pemekaran, penghapusan dan penggabungan daerah, pada pasal 2 menyebutkan pemekaran

daerah/wilayah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui:

1. Percepatan pelayanan kepada masyarakat
2. Percepatan pertumbuhan kehidupan demokrasi
3. Percepatan pertumbuhan pembangunan ekonomi daerah
4. Percepatan pengelolaan potensi daerah
5. Peningkatan keamanan dan ketertiban
6. Peningkatan hubungan yang sersasi antara pusat dan daerah

Terdapat beberapa alasan kenapa pemekaran wilayah sekarang menjadi salah satu pendekatan yang cukup diminati dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan pelayanan publik, yaitu:

1. Keinginan untuk menyediakan pelayanan publik yang lebih baik dalam wilayah kewenangan yang terbatas/terukur. Pendekatan pelayanan melalui pemerintahan yang baru diasumsikan akan lebih dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dibandingkan dengan pelayanan melalui pemerintahan daerah induk dengan cakupan wilayah pelayanan yang lebih luas melalui proses perencanaan pembangunan daerah pada skala yang lebih terbatas, maka pelayanan publik sesuai kebutuhan lokal akan lebih tersedia.
2. Mempercepat pertumbuhan ekonomi penduduk setempat melalui perbaikan kerangka pengembangan ekonomi daerah berbasis potensi lokal. Dengan dikembangkannya daerah baru yang otonom, maka akan memberikan peluang untuk menggali berbagai potensi ekonomi daerah baru yang selama ini tidak tergali.
3. Penyerapan tenaga kerja secara lebih luas di sektor pemerintahan dan bagi-bagi kekuasaan di bidang politik dan pemerintahan. Kenyataan politik seperti ini juga mendapat dukungan yang besar dari masyarakat sipil dan dunia usaha, karena berbagai peluang ekonomi baru baik secara formal maupun informal menjadi lebih tersedia sebagai dampak ikutan pemekaran wilayah.

2.1.3.2 Prinsip pemekaran wilayah

Perkembangan wilayah biasanya merupakan wujud dari keinginan masyarakat di suatu daerah untuk tumbuh dan berkembang dari segi ekonomi, politik, sosial, budaya dan keamanan dalam dimensi geografis. Tingkat perkembangan wilayah dapat dilihat dari rasio luas wilayah terbangun (*built-up area*) terhadap total luas wilayah. Semakin besar rasionya, maka semakin tinggi tingkat perkembangan wilayahnya. Semakin luas *built-up area*-nya maka dapat diartikan semakin tinggi pula aktivitas ekonomi masyarakatnya. Kondisi tersebut dapat dilihat dari semakin rapatnya jaringan jalan, semakin meluasnya wilayah perkantoran dan perdagangan, semakin menyebarnya wilayah pemukiman dengan kepadatan penduduk yang tinggi dan tingginya peluang kerja (Harmantyo, 2010).

Realitas struktur pemerintahan terpusat (sentralisasi), kesenjangan wilayah (*regional disparity*), ketidakadilan, dan ketimpangan dalam hal pemerataan pembangunan (*regional inequality*), di satu sisi terjadi percepatan pembangunan dan penumpukan manufaktur, di sisi lain pembangunan berjalan sangat lambat mendorong kuatnya arus tuntutan daerah-daerah untuk melakukan pemekaran wilayah (Hamri et al., 2016).

Semakin meningkatnya kegiatan ekonomi mulai dari pusat bisnis (*Central Business District* atau CBD) yang cenderung berkembang kearah luar, baik secara difusif maupun secara lompatan katak (*leaf frog*), mengakibatkan tumbuhnya kota-kota satelit sebagai lokasi pemukiman baru. Oleh karena sebuah pemukiman kota baru atau kota satelit sukar membutuhkan luas tanah yang besar dan di dalam wilayah kota sendiri ketersediaan tanah semakin terbatas dan cenderung sangat mahal, maka lokasi kota-kota baru tersebut akan menyebar diluar wilayah kota asalnya. Proses inilah yang kemudian menyebabkan wilayah administratif tetangganya memperoleh manfaat dengan semakin berkembangnya daerah perbatasannya.

Apapun alasannya, pemekaran daerah harus mengutamakan serta mengedepankan kesejahteraan rakyat (Christia & Ispriyarso, 2019).

Alasan-alasan pemekaran wilayah adalah:

1. Alasan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.
Hal ini dijadikan alasan utama karena adanya kendala geografis, infrastruktur dan sarana perhubungan yang minim.
2. Alasan Historis
Pemekaran suatu daerah dilakukan karena alasan sejarah, yaitu bahwa daerah hasil pemekaran memiliki nilai historis tertentu.
3. Alasan Kultural atau budaya (etnis)
Pemekaran wilayah terjadi karena menganggap adanya perbedaan budaya antara daerah yang bersangkutan dengan daerah induknya.
4. Alasan ekonomi
Pemekaran wilayah diharapkan dapat mempercepat pembangunan di daerah.
5. Alasan anggaran
Pemekaran daerah dilakukan untuk mendapatkan anggaran dari pemerintah. Sebagaimana diketahui daerah yang dimekarkan akan mendapatkan anggaran dari daerah induk selama 3 tahun dan mendapatkan dana dari pemerintah pusat (DAU dan DAK).
6. Alasan keadilan
Pemekaran dijadikan alasan untuk mendapatkan keadilan. Artinya, pemekaran daerah diharapkan akan menciptakan keadilan dalam hal pengisian jabatan publik dan pemerataan pembangunan.

2.1.3.3 Tujuan pemekaran wilayah

Tujuan yang relevan dengan pemekaran daerah adalah untuk : 1) meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat, 2) memperkuat basis ekonomi rakyat, 3) mengatur perimbangan keuangan daerah dan pusat, 4) membuka peluang dan lapangan pekerjaan dan 5) memberikan peluang daerah mendapatkan investor secara langsung (Saparini, 2013).

Kebijakan yang banyak di atur dalam regulasi yang ada selama ini adalah kebijakan tentang pemekaran daerah. Rumusan tujuan kebijakan pemekaran daerah telah banyak dituangkan dalam berbagai kebijakankebijakan yang ada selama ini, baik dalam undang-undang maupun peraturan pemerintah. Dalam regulasi-regulasi ini, secara umum bisa dikatakan bahwa kebijakan pembentukan, penghapusan dan penggabungan harus diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui 1) peningkatan pelayanan kepada masyarakat, 2) percepatan pertumbuhan kehidupan demokrasi 3) percepatan pelaksanaan pembangunan perekonomian daerah, 4) percepatan pengelolaan potensi daerah, dan 5) peningkatan keamanan dan ketertiban(Ghulam, 2008).

2.1.3.4 Dampak Pemekaran Wilayah

Pemekaran wilayah berimplikasi pada segala aspek kehidupan. Dampak-dampak pemekaran wilayah meliputi hal-hal sebagai berikut(Ghulam, 2008) :

1. Dampak Sosio Kultural

Dari dimensi sosial, politik dan kultural, bisa dikatakan bahwa pemekaran daerah mempunyai beberapa implikasi positif, seperti pengakuan sosial, politik dan kultural terhadap masyarakat daerah. Melalui kebijakan pemekaran, sebuah entitas masyarakat yang mempunyai sejarah kohesivitas dan kebesaran yang panjang, kemudian memperoleh pengakuan setelah dimekarkan sebagai daerah otonom baru. Pengakuan ini memberikan kontribusi positif terhadap kepuasan masyarakat, dukungan daerah terhadap pemerintah nasional, serta manajemen konflik antar kelompok atau golongan dalam masyarakat.

Namun demikian, kebijakan pemekaran juga bisa memicu konflik antar masyarakat, antar pemerintah daerah yang pada gilirannya juga menimbulkan masalah konflik horisontal dalam masyarakat. Sengketa antara pemerintah daerah induk dengan pemerintah daerah pemekaran dalam hal pengalihan aset dan batas wilayah, juga sering berimplikasi pada

ketegangan antar masyarakat dan antara masyarakat dengan pemerintah daerah.

2. Dampak pada pelayanan publik

Dari dimensi pelayanan publik, pemekaran daerah memperpendek jarak geografis anantara pemukiman penduduk dengan sentra pelayanan, terutama ibu kota pemerintahan daerah. Pemekaran juga mempersempit rentang kendali antara pemerintah daerah dengan unit pemerintahan dibawahnya. Pemekaran juga memungkinkan untuk menghadirkan jenis-jenis pelayanan baru, seperti pelayanan listrik, telepon, serta fasilitas urban lainnya, terutama di wilayah ibukota daerah pemekaran.

Pemekaran juga menimbulkan implikasi negatif bagi pelayanan publik, terutama pada skala nasional, terkait dengan alokasi anggaran untuk pelayanan publik yang berkurang. Hal ini disebabkan adanya kebutuhan belanja aparat dan infrastruktur pemerintahan lainnya yang bertambah dalam jumlah yang signifikan sejalan dengan pembentukan DPRD dan birokrasi di daerah hasil pemekaran. Namun, kalau dilihat dari kepentingan daerah semata, pemekaran bisa jadi tetap menguntungkan, karena daerah hasil pemekaran akan memperoleh alokasi DAU dalam posisi sebagai daerah otonom baru.

3. Dampak bagi pembangunan ekonomi

Pasca terbentuknya DOB terdapat peluang yang besar bagi akselerasi pembangunan ekonomi di wilayah yang baru diberi status sebagai daerah otonom dengan pemerintahan sendiri. Bukan hanya infarastruktur pemerintahan yang terbangun, tetapi juga infrastruktur fisik yang menyertainya, seperti infrastruktur jalan, transportasi, komunikasi dan sejenisnya. Selain itu, kehadiran pemerintah daerah otonom baru juga memungkinkan lahirnya infrastruktur kebijakan pembangunan ekonomi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah otonom baru. Semua infrastruktur ini membuka peluang yang lebih besar bagi wilayah hasil pemekaran untuk mengakselerasi pembangunan ekonomi.

Namun, kemungkinan akselerasi pembangunan ini harus dibayar dengan ongkos yang mahal, terutama anggaran yang dikeluarkan untuk membiayai pemerintahan daerah, seperti belanja pegawai dan belanja operasional pemerintahan daerah lainnya. Dari sisi teoritik, belanja ini bisa diminimalisir apabila akselerasi pembangunan ekonomi daerah bisa dilakukan tanpa menghadirkan pemerintah daerah otonom baru melalui kebijakan pemekaran daerah. Melalui kebijakan pembangunan ekonomi wilayah yang menjangkau seluruh wilayah, akselerasi pembangunan ekonomi tetap dimungkinkan untuk dilakukan dengan harga yang murah. Namun, dalam perspektif masyarakat daerah, selama ini tidak ada bukti yang meyakinkan bahwa pemerintah nasional akan melakukan tanpa kehadiran pemerintah daerah otonom.

4. Dampak pada pertahanan, keamanan dan integrasi Nasional

Pembentukan DOB bagi beberapa masyarakat pedalaman dan masyarakat di wilayah perbatasan dengan Negara lain, merupakan isu politik nasional yang penting. Bagi masyarakat tersebut, bisa jadi mereka tidak pernah melihat dan merasakan kehadiran „Indonesia“ terutama ditandai dengan kehadiran tentra atas nama pengendalian terhadap gerakan separatis. Pemekaran daerah otonom, oleh karenanya, bisa memperbaiki penanganan politik nasional di daerah melalui peningkatan dukungan terhadap pemerintah nasional dan menghadirkan pemerintah pada level yang lebih bawah.

Tetapi, kehadiran pemerintah DOB ini harus dibayar dengan ongkos ekonomi yang mahal, terutama dalam bentuk belanja aparat dan operasional lainnya. Selain itu seringkali ongkos politiknya juga bisa sangat mahal, apabila pengelolaan politik selama proses dan pasca pemekaran tidak bisa dilakukan dengan baik. Sebagaimana terbukti pada beberapa daerah hasil pemekaran, ketidakmampuan untuk membangun inklusifitas politik antar kelompok dalam masyarakat mengakibatkan munculnya tuntutan untuk memekarkan lagi daerah yang baru saja mekar. Untuk mempersiapkan upaya pemekaran ini, proses pemekaran unit

pemerintahan terbawah, seperti desa untuk pemekaran kabupaten dan pemekaran kabupaten untuk pemekaran provinsi, merupakan masalah baru yang perlu diperhatikan.

Hasil evaluasi pemekaran wilayah menunjukkan bahwa dari aspek kinerja perekonomian daerah ditemukan dua masalah utama yang dapat diidentifikasi yaitu : pembagian potensi ekonomi yang tidak merata, dan beban penduduk miskin yang lebih tinggi (Bappenas-UNDP, 2008).

Dari sisi pertumbuhan ekonomi hasil studi menunjukkan bahwa daerah otonom baru lebih fluktuatif dibandingkan daerah induk yang relatif stabil dan meningkat. Diketahui bahwa daerah pemekaran telah melakukan upaya perbaikan kinerja perekonomian, namun karena masa transisi membutuhkan proses maka belum semua potensi ekonomi dapat digerakkan.

2.1.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan sebagai acuan bagi penulis untuk menganalisis permasalahan yang akan dibahas dalam sebuah studi. Penelitian terdahulu dengan *issue* yang relevan dijadikan rujukan bagi penulis dengan menemukan *novelty* atau kebaruan sehingga terdapat gap dengan penelitian yang sedang dilakukan. Adapun beberapa penelitian yang menjadi rujukan bagi penulis dalam meneliti tentang dampak pemekaran wilayah terhadap pembangunan manusia ini adalah sebagai berikut:

Pertama, penelitian dengan judul Kajian Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Kesenjangan Ekonomi Antar Daerah Pesisir di Provinsi Bengkulu (Nyayu Neti Arianti, Indra Cahyadinata: 2016). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesenjangan ekonomi antar daerah di pesisir pantai, Provinsi Bengkulu. Metode penelitian ini adalah kuantitatif dengan jenis data sekunder dari Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu. Penelitian ini dilakukan di Provinsi Bengkulu pada bulan Juni hingga November 2013. Temuan penelitian ini menunjukkan nilai Indeks Williamson di daerah pesisir Provinsi Bengkulu sebelum pemekaran dan

setelah pemekaran adalah 0,43:0,22, yang artinya terdapat kesenjangan ekonomi yang cukup tinggi sebagai dampak dari pemekaran wilayah.

Kedua, penelitian yang berjudul Analisis Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Lampung Barat. (Yayan Amroni: 2012). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemekaran wilayah terhadap pertumbuhan ekonomi Kab. Lampung Barat. Metode penelitian ini adalah kuantitatif dengan data sekunder yaitu berupa data *time series* mulai dari tahun 2010 hingga 2016. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda dan uji beda *paired t-test*. Temuan menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung Barat sebelum dan sesudah pemekaran karena tidak terjadi peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pertumbuhan ekonomi Lampung Barat belum optimal karena masih belum diiringi dengan meningkatnya PDRB, penurunan kemiskinan dan masih adanya ketimpangan distribusi pendapatan.

Ketiga, penelitian dengan judul Indeks Pembangunan Manusia Pasca Pemekaran Wilayah Pada Enam Kabupaten di Provinsi Aceh (Syata Maulida dan Vivi Silvia: 2016). Tujuan penelitian untuk melihat dan menganalisis dampak pemekaran wilayah terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada enam kabupaten hasil pemekaran di Provinsi Aceh. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan analisis linier berganda untuk data panel dari tahun 2007-2013. Variabel dummy digunakan untuk melihat perbandingan kabupaten pemekaran dengan kabupaten induknya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kemampuan daya beli masyarakat dan jumlah anak lahir hidup berpengaruh positif dan signifikan terhadap angka Indeks Pembangunan Manusia. Sedangkan variabel pendidikan tertinggi yang ditamatkan tidak berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

Keempat, penelitian yang berjudul Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Perkembangan Perekonomian Dan Kinerja Pemerintah Daerah

Kota/Kabupaten Di Provinsi Banten. (Ariasakti Winata, Gagas Juanda, dan Bambang: 2016). Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh pemekaran dengan menggunakan analisis deskriptif dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi perekonomian dan kinerja pemerintah daerah. Penelitian kuantitatif dengan menggunakan analisis data panel yang diperoleh dari data sekunder. Hasil dari penelitian ini adalah Pelayanan pendidikan di Daerah Induk (DI) cenderung mengalihkan bebannya ke Daerah Otonom Baru (DOB) dan kualitas pelayanan kesehatan di Daerah Otonom Baru lebih baik daripada Daerah Induk. Pemekaran wilayah menjadikan Daerah Otonom Baru memiliki keunggulan kualitas Sumber Daya Manusia daripada Daerah Induk, pertumbuhan ekonomi Daerah Otonom Baru juga menjadi lebih baik daripada Daerah Induk.

Kelima, penelitian yang berjudul *Assessing Impact of the Water Poverty Index Component on the Human Development Index in Iran* (Tahmineh Ladi, Asrin Mahmoudpour, dan Ayyoob Sharifi: 2021). Penelitian ini fokus untuk menguji pengaruh komponen Indeks Kemiskinan Air (sumber daya, kapasitas, akses, penggunaan, dan lingkungan) terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Iran. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan model analisis regresi OLS (*Ordinary Least Square*). Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari Indeks Pembangunan Manusia oleh *United Nation Development Programme* (UNDP) untuk Negara Iran. Komponen sumber daya *Water Poverty Index* (WPI) memiliki dampak terbesar pada Indeks Pembangunan Manusia di Iran, diikuti oleh komponen kapasitas, lingkungan, penggunaan, dan akses. Selain itu, sementara komponen penggunaan berbanding terbalik dengan Indeks Pembangunan Manusia, peningkatan komponen lain menyebabkan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia. Penelitian kuantitatif ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada variabel tidak terikat, variabel tidak terikat pada penelitian ini adalah Indeks Pembangunan

Manusia, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti memiliki variabel kesejahteraan masyarakat.

Sebuah penelitian dengan merujuk kepada penelitian terdahulu harus memiliki novelty yang dapat dijadikan gap penelitian. Penelitian ini memiliki kesamaan dasar dengan penelitian terdahulu terletak pada variabel terikat yaitu Pemekaran Wilayah. Sedangkan perbedaan antara penelitian ini dan penelitian terdahulu terletak pada variabel tidak terikat, dimana penelitian ini fokus pada tingkat kesejahteraan masyarakat.

2.1.5 Hipotesis Penelitian

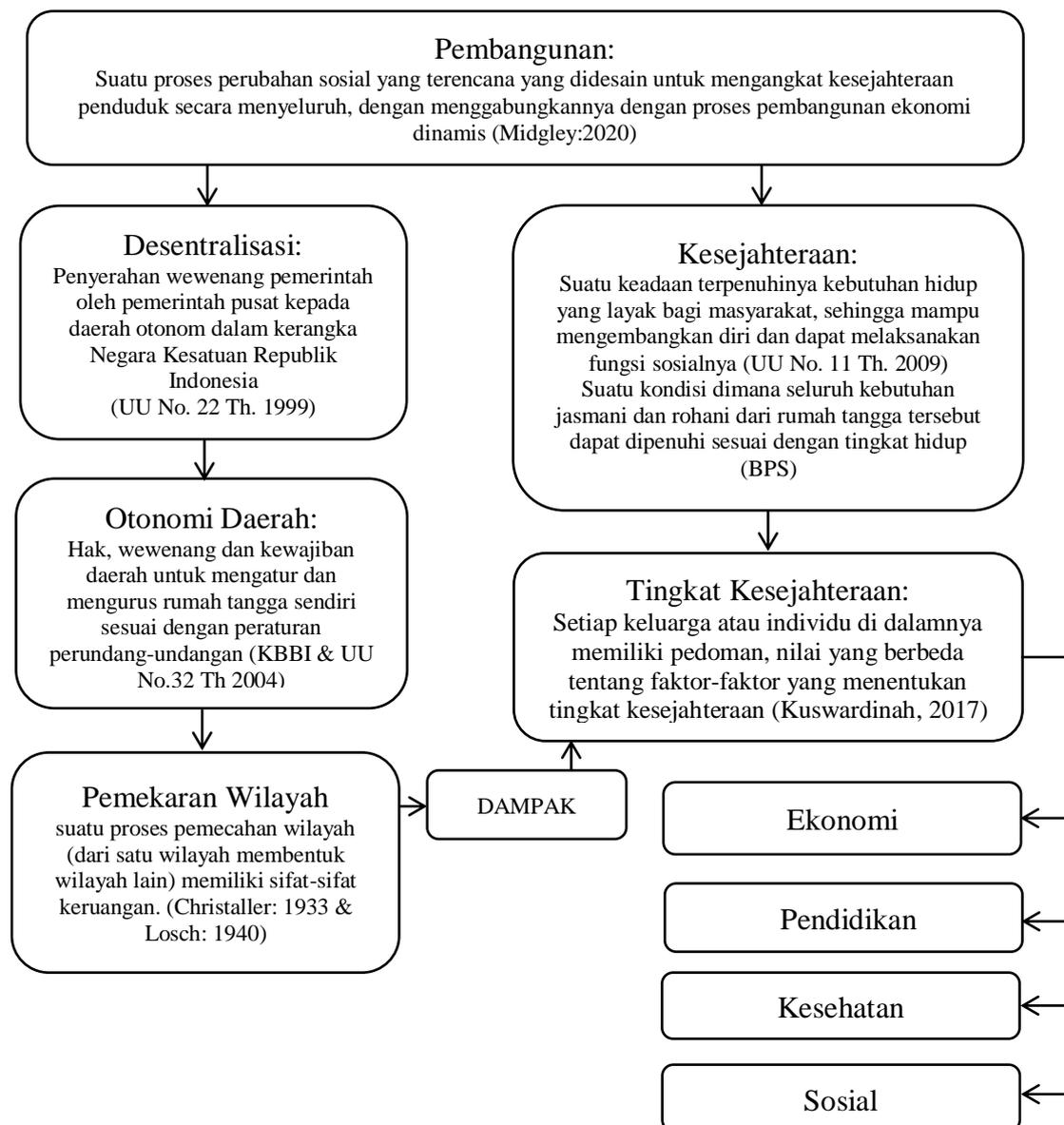
Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan (Sugiyono, 2010). Berdasarkan tinjauan teoritis dan hasil temuan empiris yang telah dipaparkan di atas, maka hipotesis penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Terdapat perbedaan tingkat kesejahteraan masyarakat pada aspek Ekonomi sebelum dan sesudah pemekaran wilayah
2. Terdapat perbedaan tingkat kesejahteraan masyarakat pada aspek Pendidikan sebelum dan sesudah pemekaran wilayah
3. Terdapat perbedaan tingkat kesejahteraan masyarakat pada aspek Kesehatan sebelum dan sesudah pemekaran wilayah
4. Terdapat perbedaan tingkat kesejahteraan masyarakat pada aspek sosial sebelum dan sesudah pemekaran wilayah

2.1.6 Kerangka Teori dan Kerangka Pikir

Berdasarkan paparan teori diatas, penulis memberikan gambaran tentang kerangka teori yang menjadi acuan dalam penelitian ini. Kerangka teori merupakan suatu gambaran atau rencana yang berisi tentang penjelasan dari semua hal yang dijadikan sebagai bahan penelitian yang berlandaskan pada hasil dari penelitian tersebut. kerangka teori biasanya juga berisi mengenai relasi antara sebuah variable dengan variable yang lainnya, yang biasanya terdapat sebab serta akibat dari kedua atau lebih

dari dua variabel tersebut Kerangka teori penelitian digambarkan dalam bagan pada gambar 2.1 berikut:



Gambar 2.1: Bagan Kerangka Teoritis

Ada beberapa hal pokok yang menjadi landasan berfikir dalam penelitian yang akan dilakukan nantinya, untuk itu penelitian yang akan dilakukan ini mengutip beberapa pendapat para ahli yang berhubungan langsung dengan permasalahan yang nantinya akan dikaji secara mendalam.

Aspek-aspek yang dilimpahkan tersebut meliputi kondisi kesejahteraan masyarakat di kabupaten Musi Rawas setelah dimekarkan, dan analisis dampak pemekaran wilayah terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat manusia di kabupaten Musi Rawas Utara.

Adapun dimensi yang dikaji dalam kesejahteraan masyarakat adalah suatu kondisi dimana seluruh kebutuhan jasmani dan rohani dari masyarakat yang diperkecil kepada rumah tangga, lalu diperkecil kepada individu dapat dipenuhi sesuai dengan tingkat hidup. Kesejahteraan masyarakat diukur dengan beberapa indikator yaitu aspek ekonomi, aspek pendidikan, aspek kesehatan, dan aspek sosial. Kesejahteraan Masyarakat yang diukur dalam penelitian ini adalah Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Musi Rawas Utara sesudah pemekaran wilayah.

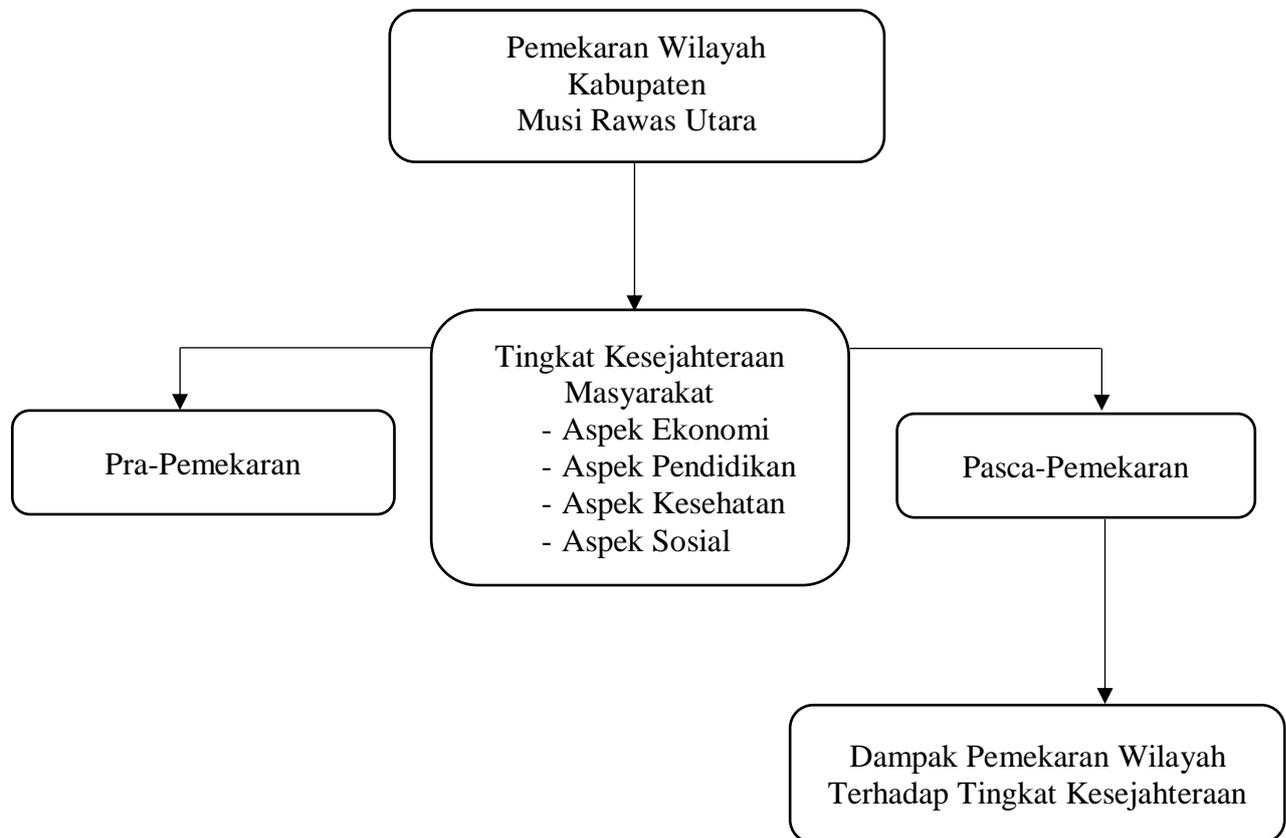
Dalam hal kesejahteraan masyarakat, pemerintah memiliki peran yang sangat krusial. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah menjadi prasyarat efektifnya proses pembangunan manusia untuk *output* berupa kesejahteraan masyarakat. Kebijakan pembentukan Daerah Otonom Baru menjadi salah satu peluang sekaligus tantangan bagi pemerintah untuk mempercepat akselerasi pembangunan.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis menggambarkan skema Kerangka Berpikir penelitian ini. Kerangka Berfikir adalah merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah penting. kerangka berfikir menjelaskan secara teoritis pertautan antara variabel-variabel yang akan diteliti.

Kerangka pikir merupakan jalur pemikiran yang dirancang berdasarkan kegiatan peneliti yang dilakukan. Kerangka pikir adalah merupakan konsep berisikan hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat dalam rangka memberikan jawaban sementara.

Penulis membuat konstruksi kerangka berpikir dalam bentuk skema yang menggambarkan jalur pemikiran penelitian. Gambar 2.2

merupakan skema kerangka berfikir yang akan digunakan peneliti dalam melakukan penelitian:



Gambar 2.2 Skema Kerangka Berpikir

2.1.7 Definisi Operasional Penelitian

Definisi operasional dimaksudkan untuk menghindari kesalahan pemahaman dan perbedaan penafsiran terkait istilah-istilah yang ada dalam judul penelitian. Sesuai dengan judul penelitian ini yaitu “Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Musi Rawas Utara”, maka definisi operasional variabel penelitian yang harus dijelaskan tercantum dalam tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.1 Definisi Operasional Variabel Penelitian

Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Alat Ukur	Skala Data
Variabel independent: Pemekaran Wilayah	Pembentukan wilayah administratif baru baik di tingkat provinsi maupun kota/kabupaten dari induknya.	Adanya pemerintahan baru yang memiliki legalitas konstitusional		-
Variabel dependen: Tingkat Kesejahteraan Masyarakat	Suatu kondisi dimana seluruh kebutuhan jasmani dan rohani dari masyarakat yang diperkecil kepada rumah tangga dapat dipenuhi sesuai dengan tingkat hidup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aspek Ekonomi <ul style="list-style-type: none"> - Terpenuhinya Kebutuhan dasar keluarga - Pendapatan, Pengeluaran, dan Konsumsi Keluarga - Peluang Kerja yang luas 2. Aspek Pendidikan <ul style="list-style-type: none"> - Tingkat Pendidikan yang ditamatkan - Akses Terhadap Fasilitas Pendidikan - Biaya pendidikan - Pendidikan yang non-diskriminatif 3. Aspek Kesehatan <ul style="list-style-type: none"> - Akses terhadap fasilitas kesehatan - Kualitas dan kuantitas fasilitas kesehatan - Biaya berobat 4. Aspek Sosial <ul style="list-style-type: none"> - Angka kriminalitas - Keterlibatan masyarakat pada aktifitas sosial - Akses terhadap fasilitas sosial 	Kuesioner	Skala Rating: 1 – 10 Skala yang memberikan pilihan jawaban rentang angka kepada responden. Skor 1 merupakan skor terendah dan skor 10 adalah skor tertinggi.

2.1.8 Kerangka Konsep

Kesejahteraan masyarakat adalah tujuan utama dari pembangunan. Sebagai salah satu prioritas, keberhasilan pembangunan ditunjukkan

Kesejahteraan masyarakat kemudian diupayakan percepatan pencapaiannya melalui berbagai kebijakan, diantaranya adalah melalui desentralisasi yang bersumber dari kebijakan otonomi daerah. Kebijakan ini membuka kemungkinan percepatan pencapaian tujuan pembangunan melalui kebijakan pemekaran wilayah.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, yang secara sederhana diartikan sebagai penelitian yang berdasarkan data angka-angka. Penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang diterapkan.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian survei. Dalam penelitian survei, peneliti menanyakan ke beberapa orang (responden) tentang keyakinan, pendapat, karakteristik suatu obyek dan perilaku yang telah lalu atau sekarang. Metode Penelitian survei berkenan dengan pertanyaan tentang keyakinan dan perilaku dirinya sendiri.

Semua anggota sampel atau responden dalam penelitian survei menjawab pertanyaan yang sama. Penelitian survei mengukur nilai beberapa variabel, menguji beberapa hipotesis tentang perilaku, pengalaman dan karakteristik suatu obyek. Pendekatan ini digunakan untuk menjawab pertanyaan pada rumusan masalah yang termuat dalam Bab I.

3.2 Waktu dan Tempat Penelitian.

Pengumpulan data dilakukan dari bulan Agustus 2021 sampai Desember 2021. Sedangkan waktu penelitian akan dilaksanakan pada bulan Juli 2022 sampai penelitian selesai. Tempat penelitian adalah Kabupaten Musi Rawas Utara yang memiliki 7 (tujuh) kecamatan dimana lokasi ini dipilih karena Kabupaten Musi Rawas Utara merupakan Daerah Otonom Baru yang dimekarkan dari Daerah Induk yaitu Kabupaten Musi Rawas pada tahun 2013. Peneliti menganggap masalah kesejahteraan pada DOB hasil pemekaran perlu diteliti lebih lanjut, agar dapat diketahui apakah pemekaran wilayah berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif, diperoleh dengan menyebarkan kuesioner kepada masyarakat Kabupaten Musi Rawas Utara yang berdomisili sejak tahun 2010. Hal ini digunakan untuk menggali kondisi kesejahteraan pasca pemekaran wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara.

Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer yang berupa kuesioner yang disebarakan kepada responden, dan data sekunder yang merupakan buku referensi, jurnal, surat kabar, serta dari browsing website internet yang terkait dengan masalah kesejahteraan masyarakat. Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dilapangan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini biasanya diperoleh dari perpustakaan atau dari laporan-laporan penelitian terdahulu.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Data kuantitatif yang diperoleh dalam penelitian ini dikumpulkan dengan metode penyebaran kuesioner kepada responden dan studi pustaka.

3.4.1 Kuesioner

Data yang didapat dalam penelitian ini diperoleh dengan menyebarkan kuesioner, yakni peneliti terjun langsung untuk mendapatkan data dari pihak yang bersangkutan secara langsung atau disebut juga data primer. Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Selanjutnya peneliti melakukan pengambilan data langsung pada obyek penelitian dengan cara menyebarkan kuesioner (Sugiyono, 2010).

Kuesioner diberikan secara langsung kepada para responden yang sudah dijadikan sampel, kuesioner yang diberikan kepada para responden berisi beberapa pertanyaan yang harus dijawab oleh responden yang bertujuan untuk mengukur pengaruh pemekaran wilayah terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat pada aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan sosial.

Dalam kuesioner yang diberikan kepada responden menggunakan metode pengukuran skala *rating*, yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena

tertentu. Masing-masing jawaban dari 10 alternatif jawaban yang tersedia diberi bobot nilai (skor) 1 sebagai skor terendah dan skor 10 sebagai skor tertinggi.

3.4.2 Studi Pustaka

Teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Data yang diambil penulis dalam metode kepustakaan ini berasal dari jurnal-jurnal yang berkaitan dengan judul yang diteliti oleh penulis, buku-buku literatur, dan penelitian sejenisnya.

3.5 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Kabupaten Musi Rawas yang berada pada 7 (tujuh) kecamatan yang setelah pemekaran menjadi Kabupaten Musi Rawas Utara. Pada tabel 3.1 digambarkan jumlah penduduk masing-masing kecamatan yang dimekarkan menjadi DOB Kabupaten Musi Rawas Utara.

Tabel 3.1 Jumlah Penduduk Kabupaten Musi Rawas Pada Tahun 2020

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk
1.	Rawas Ulu	33057
2.	Ulu Rawas	12215
3.	Rupit	37221
4.	Karang Jaya	30185
5.	Rawas Ilir	34601
6.	Karang Dapo	19876
7.	Nibung	27250
Jumlah		194.405

Sumber: BPS Musi Rawas Utara Tahun 2022

Sampel dalam penelitian ini adalah masyarakat Kabupaten Musi Rawas Utara yang telah berdomisili sejak sebelum pemekaran wilayah, dengan kriteria inklusi dan eksklusi sebagai berikut:

a. Kriteria Inklusi

- 1) Berdomisili di Kabupaten Musi Rawas Utara sebelum tahun 2013 hingga penelitian dilakukan

- 2) Berusia diatas 20 tahun ketika penelitian dilakukan
 - 3) Mampu berkomunikasi dengan baik dan jelas
- b. Kriteria Eksklusi
- 1) Tidak bersedia menjadi responden penelitian
 - 2) Responden tidak dapat ditemui
 - 3) Responden mengalami sakit parah saat proses pengumpulan data

3.6 Teknik Sampling

Metode pengambilan sample yang digunakan dalam penelitian ini adalah *multistage random sampling*. *Multistage random sampling* adalah metode sampling yang dilakukan secara bertingkat untuk meningkatkan akurasi data (Sugiyono, 2010). Metode pertama dihitung dengan menggunakan rumus sampel penelitian *cross-sectional* atau penelitian survey. Selanjutnya, dilakukan metode *Probability Proportional to Size Sampling* yaitu suatu prosedur penarikan sampel di mana peluang terpilihnya suatu unit sampel sebanding dengan ukuran unit sampel tersebut. Karena jumlah populasi secara keseluruhan (N) diketahui, maka rumus *cross-sectional* yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$(n) = \frac{Z_{1-\frac{\alpha}{2}}^2 P(1-P)N}{d^2(N-1) + Z_{1-\frac{\alpha}{2}}^2 P(1-P)}$$

Berdasarkan rumus tersebut, maka perhitungan jumlah sample dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$(n) = \frac{(1,96^2) \times 0,5 (1 - 0,5) 194.405}{0,1^2(194.405 - 1) + 1,96^2 (1 - 0,5)}$$

$$(n) = \frac{(3,8416) \times 0,5 (0,5) 194.405}{0,01 (194.404) + 3,8416(0,5)}$$

$$(n) = \frac{186.706,56}{1.944,04 + 1,9208}$$

$$(n) = \frac{186.706,56}{1.945,96}$$

$$(n) = 95,945 = 96$$

Keterangan:

n : Jumlah sampel yang diperlukan

$Z\alpha$: Nilai standar dari distribusi sesuai dengan nilai $\alpha = 5\% = 1.96$

P : Proporsi angka kesejahteraan. Karena data belum didapatkan maka dipakai 50%

N : Jumlah total penduduk Kabupaten Musi Rawas Utara pada tahun 2020 yaitu 194.404

d : Tingkat ketelitian 10%

Untuk menjadikan data penelitian lebih representatif, maka sampel diambil dari 2 kecamatan yang ada di Kabupaten Musi Rawas Utara, yaitu Kecamatan Rupit dan Kecamatan Rawas Ulu sehingga jumlah sampel menjadi 192. Pada penelitian ini penulis melakukan penambahan sampel sebanyak 10 persen dari total sampel yang dihitung untuk mengantisipasi *drop out*. Jumlah sampel ditambah dengan 10 persen dengan rumus:

$$n = \frac{n}{1-f}$$

Keterangan:

n = Besar sampel yang dihitung

f = perkiraan proporsi *drop out*

$$n = \frac{192}{1-0,10}$$

$$n = 213$$

Jumlah responden secara keseluruhan setelah penambahan sebagai antisipasi *drop out* adalah 213. Namun karena berbagai kendala seperti responden tidak bersedia untuk memberikan jawaban atas pertanyaan pada kuesioner penelitian, maka total sampel yang didapatkan penulis adalah 196.

3.7 Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul, maka selanjutnya penulis menganalisa data tersebut sehingga dapat ditarik kesimpulan. Dalam menganalisa ini penulis

menggunakan metode berfikir deduktif yakni berangkat dari fakta-fakta yang umum, peristiwa-peristiwa yang konkrit, kemudian dari fakta-fakta dan peristiwa yang umum dan konkrit ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat khusus (Creswell & Clark, 2011).

Penelitian ini bertujuan untuk Menganalisis tingkat kesejahteraan masyarakat sesudah adanya pemekaran Kabupaten Musi Rawas Utara dengan melihat indikator dalam aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan sosial. Alat uji analisis data menggunakan analisis uji beda *paired sample t-test* dimana *paired sample t-test* adalah uji statistik yang membandingkan rata-rata dari dua data dan berasal dari satu kelompok sampel. Artinya, tiap orang pada kelompok sampel tersebut akan memberikan kontribusi pada data pertama dan data kedua. Paired sample t-test digunakan untuk melihat apakah terdapat perbedaan signifikan antara dua kelompok data tersebut.

Teknik analisis data *paired sample t-test* merupakan uji parametrik. Sehingga, sebelum melakukan pengujian, terlebih dahulu hendak dipastikan bahwa data telah memenuhi asumsi-asumsi tertentu. Hal ini sangat penting untuk dilakukan karena mempengaruhi keabsahan dari kesimpulan yang diperoleh.

Adapun asumsi-asumsi prasyarat dari *paired sample t-test* adalah sebagai berikut.

1. Setiap pengukuran yang berpasangan harus ditentukan dari subjek yang sama.
2. Variabel uji (terikat) berupa data kontinu, baik berupa interval maupun ratio.
3. Tiap subjek (anggota sampel) harus saling bebas, yaitu pengukuran untuk suatu subjek tidak dipengaruhi oleh pengukuran untuk subjek lainnya.
4. Selisih yang diukur (*post-pre*) berdistribusi normal.

Analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh pemekaran wilayah (variabel X) terhadap kesejahteraan masyarakat (Variabel Y) yang komponennya adalah ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan sosial. Adapun perhitungan dalam analisis data ini menggunakan aplikasi software pengolah data statistik.

Apabila data yang diukur tidak berdistribusi normal, maka alternatif analisis data yang digunakan adalah uji non-parametrik, yaitu uji *wilcoxon sign rank test*. Uji *Wilcoxon Signed Rank-Test* bertujuan untuk menguji signifikansi hipotesis komparatif dua sampel yang berhubungan bila datanya berbentuk ordinal, penggunaan uji *wilcoxon signed rank test* ini digunakan untuk penelitian yang mempunyai data yang outlier (ekstrem tinggi atau ekstrem rendah) pada data sampel yang berhubungan dengan menggunakan taraf signifikansi sebesar 5% dan dilakukan menggunakan bantuan *software* pengolah data statistik. (Cooper & Schindler, 2014).

Selanjutnya, untuk menghitung persentasi dampak pemekaran wilayah, digunakan rumus sebagai berikut:

$$\frac{x-y}{y} \times 100\%$$

Keterangan:

x : Nilai Akhir

y : Nilai Awal

BAB IV

GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN

4.1 Kabupaten Musi Rawas Utara

Kabupaten Musi Rawas Utara adalah kabupaten yang terletak paling barat di Provinsi Sumatera Selatan dengan luas wilayah 600.865,51 Ha. Kabupaten Musi Rawas Utara merupakan hasil dari pemekaran Kabupaten Musi Rawas. Geografi Muratara meliputi tujuh kecamatan dan 82 desa 7 kelurahan. Sungai Rawas adalah sungai terbesar di kabupaten itu yang membentang dari Ulu Rawas sampai ke muara rawas terhubung dengan laut Cina Selatan. Diketahui, setengah dari luas keseluruhan wilayah yang ada di Kabupaten Musi Rawas Utara merupakan kawasan hutan yang terdiri dari hutan suaka alam, hutan lindung dan hutan pengelolaan sedangkan sebagian lainnya digunakan untuk pemukiman penduduk dan industri.

Potensi kekayaan tambang yang dimiliki kabupaten Musi Rawas Utara adalah batubara, minyak dan gas bumi serta emas. Potensi lain yang ada di kabupaten Musi Rawas Utara antara lain pertanian, perikanan, perkebunan dan agro industri.

Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara yang merupakan pemekaran dari kabupaten induk Musi Rawas yakni tujuh kecamatan Rupit, Rawas Ulu, Nibung, Rawas Ilir, Karang Dapo, Karang Jaya dan Ulu Rawas.

Kabupaten Musi Rawas Utara dibawah kepemimpinan Bupati Bapak Devi Suhartoni dan Wakil Bupati Bapak Inayatullah, memiliki Visi dan Misi sebagai berikut:

Visi:

"Mewujudkan "CITRA Muratara Berhidayah" Kreatif, Inovatif, Transparan, Responsif dan Akuntabel (CITRA)"

Misi Kabupaten Musi Rawas Utara adalah:

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang cerdas, Inovatif, Tranparan dan Akuntabel. Ini sudah berjalan dengan cepat sekali, ini

dibuktikan bahwa sistem pelaporan keuangan dan administrasi lainnya sudah mulai tertata dengan baik.

2. Meningkatkan kegiatan keagamaan secara baik, toleran berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
3. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan infrastruktur dan kebutuhan dasar yang berkualitas.
4. Meningkatkan perekonomian masyarakat melalui penguatan sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan UMKM.
5. Meningkatkan pembangunan sumber daya manusia yang unggul, berakhlak dan berdaya saing, ini dibuktikan dengan pembangunan dan rehabilitasi sekolah-sekolah, Perbub wajib berdoa sebelum belajar, lingkungan sekolah yang mulai rapih dan bersih serta seragam dan peralatan sekolah gratis.
6. Pariwisata dan budaya
7. Pertambangan
8. Lingkungan hidup
9. Hukum dan keamanan,

Semua misi ini telah berjalan, khususnya hukum dan keamanan, masyarakat kita sudah menyadari hukum, lintasan yang dahulunya kurang aman, sekarang sudah kondusif dan tentram.

4.1.1 Kondisi Geografis

Kabupaten Musi Rawas Utara merupakan salah satu dari 17 kabupaten/kota di wilayah administratif Provinsi Sumatera Selatan. Kabupaten yang dulunya merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Musi Rawas resmi menjadi Daerah Otonomi Baru berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 2013. Secara geografis, Kabupaten Musi Rawas Utara terletak antara 702°4'0" BT-103.22'13" BT dan 2°19,15, LS-306',30" LS. Kabupaten Musi Rawas Utara dilewati dua sungai besar yaitu Sungai Rawas dan Sungai Rupil. Keberadaan sungai-sungai besar menimbulkan ancaman bencana yang besar pula bagi Kabupaten Musi Rawas Utara, khususnya pada bagian tengah yang memiliki elevasi yang relatif rendah dibandingkan bagian barat dan timur. Kabupaten Musi Rawas Utara memiliki

topografi yang beragam mulai dari dataran rendah hingga dataran tinggi ketinggian wilayah kabupaten ini berkisar antara 125 -250 meter diatas permukaan laut. Setiap tahun di Kecamatan Rupit dan Karang Dapo terjadi bencana banjir sehingga mengganggu aktivitas masyarakat, terutama sektor pertanian. Hal ini Juga didukung oleh luasnya lahan kritis di Kabupaten Musi Rawas Utara yang mencapai 55.591.067 Ha. Isu bencana alam penting untuk penanggulangan dan pencegahan sehingga tidak menghambat laju pertumbuhan daerah.

Kabupaten Musi Rawas Utara termasuk dalam kawasan sub DAS Rawas. salah satu dari 14 sub DAS yang termasuk dalam DAS Musi. Sub DAS Rawas memiliki luas sebesar 586.169,30 Ha atau mencapai 10,97% dari luas DAS Musi dan merupakan sub DAS terluas keempat di DAS Musi. Selain wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara, wilayah sub DAS Rawas juga termasuk sebagian wilayah Kabupaten Musi Banyuasin. Sungai utama yang mengalir adalah sungai Rawas.

Pembagian suatu wilayah, administrasi menjadi wilayah administrasi yang lebih kecil memiliki manfaat diantaranya membantu kelancaran proses pemerintahan dan pembangunan wilayah serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Secara administratif luas wilayah kabupaten Musi Rawas Utara adalah seluas 6.008,55 km² 21600.905,51 Ha Kabupaten Musi Rawas Utara terbagi menjadi 7 (tujuh) kecamatan yaitu Kecamatan Ulu Rawas. Kecamatan Rawas Ulu, Kecamatan Nibung. Kecamatan Rawas Ilir, Kecamatan Karang Dapo, Kecamatan Rupit dan Kecamatan Karang Jaya. 7 kecamatan tersebut terbagi lagi menjadi wilayah administrasi yang lebih kecil dengan total 89 wilayah yang terdiri dari 82 wilayah desa dan 7 wilayah kelurahan. Berikut batas wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara:

1. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi
2. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan.
3. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan.

4. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu

Hasil analisis peta topografi Kabupaten Musi Rawas Utara menunjukkan bahwa topografi Kabupaten Musi Rawas Utara cukup bervariasi, terdiri dari pegunungan, perbukitan dan dataran. Hampir 30% dari luas wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara di sebelah barat termasuk deretan Pegunungan Bukit Barisan yang memanjang dari ujung Provinsi Nangroe Aceh Darussalam sampai ujung Provinsi Lampung. Pegunungan Bukit Barisan melintasi sebagian Kecamatan Ulu Rawas dan Kecamatan Karang Jaya di Kabupaten Musi Rawas Utara. Kemiringan lereng di daerah ini mencapai lebih dari 40% sehingga dikategorikan sebagai pegunungan dengan akses jalan yang relatif sulit untuk dilalui. Bagian tengah Kabupaten Musi Rawas Utara merupakan daerah dataran dengan kemiringan lereng kurang dari 25%. Terdapat dua sungai besar dan beberapa anak sungai yang mengalir di daerah ini sehingga banyak menghasilkan bentukan-bentukan fluvial. Daerah dataran ini mencapai hampir 50% dari luas wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara di bagian tengah. Topografi wilayah di bagian timur Kabupaten Musi Rawas Utara merupakan perbukitan dengan kemiringan lereng berkisar antara 25% sampai dengan 40% dan elevasi antara 75 meter sampai 125 meter di atas permukaan air laut. Sebagian besar daerah di Kecamatan Nibung dan Kecamatan Rawas Ilir memiliki topografi demikian.

Iklim merupakan keadaan atau kondisi cuaca yang mungkin terjadi pada suatu wilayah dalam jangka waktu yang relatif panjang lama. Curah hujan di Kabupaten Musi Rawas Utara cukup tinggi. Curah hujan mulai naik pada bulan Oktober dan mencapai titik maksimum pada bulan Januari. Curah hujan sempat mengalami penurunan di bulan Februari dan naik lagi di bulan Maret. Setelah itu curah hujan berangsur-angsur mengalami penurunan hingga akhirnya mencapai titik minimum pada bulan Agustus. Berdasarkan klasifikasi iklim menurut Schmidt-Ferguson, tipe iklim di Kabupaten Musi Rawas Utara termasuk dalam tipe iklim A atau tipe iklim yang sangat basah. Hal ini merujuk pada hasil perhitungan nilai Q yang merupakan perbandingan rerata bulan kering dengan rerata bulan basah selama tahun 2007-2013. Nilai Q sebesar 0,03 menunjukkan bahwa curah hujan yang turun di Kabupaten Musi Rawas Utara tergolong tinggi

dengan jumlah bulan basah mencapai 9-12 setiap tahunnya, sementara bulan kering hanya satu atau bahkan tidak ada setiap tahunnya. Intensitas hujan rata-rata mencapai 222 mm/bulan.

Sementara itu, hasil klasifikasi iklim menurut Oldeman yang didasarkan pada zona agroklimat atau iklim pertanian menunjukkan bahwa tipe iklim di Kabupaten Musi Rawas Utara termasuk dalam zona tipe iklim C1 dengan rerata bulan basah mencapai enam dan rerata bulan kering hanya satu. Tipe iklim C1 ini cocok diterapkan untuk tanaman padi satu kali panen dan palawija dua kali panen. Grafik curah hujan rata-rata tiap bulan di Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2007-2013. Kondisi geomorfologi Kabupaten Musi Rawas Utara secara garis besar terbagi atas tiga kenampakan morfologi, yaitu Pegunungan Bukit Barisan di sebelah barat, Dataran Rendah Fluvial di bagian tengah dan Perbukitan Lipatan di bagian timur. Pegunungan Bukit Barisan ini disusun oleh tiga kenampakan morfologi yaitu: Cuesta, Perbukitan Terkikis dan Kipas Alluvial. Secara geologi, Pegunungan Bukit Barisan ini didominasi oleh batuan-batuan berumur tersier, diantaranya adalah dari Formasi Hulu simpang, Formasi Kasiro dan Papan Betupang. Selain itu, ditemui juga batuan tua berumur Kapur dan Jura diantaranya adalah dari Formasi Peneta dan Formasi Rawas. Secara setempat juga muncul batuan terobosan Granit dan Andesit, baik yang berumur tersier maupun pratersier. Dataran Rendah Fluvial tersusun atas batuan berumur Kuafier yaitu Formasi Kasai, Endapan Aluvial dan Endapan Rawa. Di daerah dataran ini juga ditemui batuan terobosan seperti Andesit, Diorit dan Granit. Perbukitan lipatan tersusun oleh batuan tersier dari Formasi muara Enim dan Formasi Air Benakat. Keduanya muncul secara berselang seling mengikuti tubuh antiklin dan sinklin. Selain itu juga ditemui Endapan Aluvial sungai dan Endapan Rawa. Pola aliran sungai (drainage pattern) merupakan tipe dendritic, trellis hingga rectangular. Pola aliran trellis berarti sangat dipengaruhi oleh struktur geologi yang berupa lipatan (antiklin dan sinklin) dengan perpotongan sungai yang mendekati tegak lurus, sedangkan pola aliran rectangular sangat dipengaruhi oleh kekar' (retakan) yang berarah barat laut-tenggara dan baratdaya-timur laut. Pola aliran sungai di

Kabupaten Musi Rawas Utara umumnya berarah barat dayatimur laut dan barat laut-tenggara.

Kondisi Hidrologi Kabupaten Musi Rawas Utara dapat berupa air permukaan dan air bawah permukaan (air tanah). Sumber air permukaan yang ada di kabupaten ini adalah Sungai Rawas, Sungai Rupit, Danau Raya dan Danau Merung. Selain digunakan untuk kepentingan irigasi, sungai-sungai di Musi Rawas Utara juga menjadi sumber air, sarana transportasi dan fungsi domestik rumah tangga. Sungai Rawas memiliki hulu di Kecamatan Ulu Rawas dengan debit rata-rata 123.87 m³/detik. Sedangkan Sungai Rupit melewati Kecamatan Rupit dan Karang Jaya dengan debit rata-rata 54,64 m³/detik. Kondisi air di sungai Rawas dan Rupit masuk dalam kategori tercemar ringan. Danau Raya yang terletak di Kecamatan Rupit selain berfungsi untuk irigasi, juga direncanakan akan menjadi objek wisata. Danau Merung merupakan danau yang digunakan sebagai sarana irigasi untuk mengairi areal persawahan di Kecamatan Rawas Ilir dan Kecamatan Rupit. Potensi air tanah di Musi Rawas Utara didominasi oleh air tanah langka dengan luas wilayah 2.934 Ha dan akuifer produktif sedang dengan penyebaran seluas 1.059 Ha. Akuifer jenis produktif sedang yang menjadi sumber air paling baik tersebar di Kecamatan Karang Dapo, Karang Jaya bagian tenggara, Rawas Ilir bagian barat, Rupit bagian timur dan sedikit dari wilayah Nibung.

4.1.2 Kondisi Demografis

Kondisi demografis adalah sebuah kondisi yang menggambarkan jumlah dan komposisi penduduk menurut beragam kriteria: usia, etnis, jenis kelamin, status perkawinan (perkawinan atau hidup bersama), pencapaian pendidikan, distribusi spasial, dan sebagainya; proses-proses kehidupan yang dinamis yang mengubah komposisi ini: kelahiran, kematian, persatuan, migrasi, dan lain-lain; dan hubungan antara komposisi penduduk dan perubahannya, serta lingkungan sosial dan fisik yang lebih luas di mana mereka berada. (Lundquist et al., 2015)

Berdasarkan Hasil Proyeksi Interim Penduduk 2020-2023, jumlah penduduk Kabupaten Musi Rawas Utara pada tahun 2022 tercatat 192.396 ribu jiwa. Jumlah ini tidak begitu besar jika dibandingkan dengan jumlah total penduduk Provinsi Sumatera Selatan yang tercatat 8,65 juta jiwa (sekitar 2,22

persen). Saat Sensus Penduduk tahun 2020, jumlah penduduk Musi Rawas Utara tercatat 188,86 ribu jiwa. Jumlah ini terus bertambah seiring pertumbuhan penduduk, dan tercatat bertambah sekitar 3,51 ribu jiwa pada tahun 2022. Hal ini bisa disebabkan oleh angka kelahiran penduduk dan migrasi penduduk yang datang lebih besar dari angka kematian penduduk dan migrasi penduduk yang pergi. Laju Pertumbuhan Penduduk pada tahun 2022 Kabupaten Musi Rawas Utara tercatat sebesar 1,02 persen dengan perbandingan tahun 2020.

Pada tahun 2020 penduduk usia di atas 65 tahun terdapat sebanyak 4,39 persen dan terus meningkat setiap tahunnya hingga mencapai 4,88 persen pada tahun 2023. Peningkatan ini disinyalir dapat mengindikasikan peningkatan kesehatan dari sisi usia harapan hidup. Jika komposisi penduduk usia di atas 65 tahun berada di atas 10 persen, maka wilayah tersebut dikatakan mengalami “*ageing population*”.(Holt et al., 2018)

Dilihat dari struktur penduduk menurut jenis kelamin, rasio jenis kelamin/*sex ratio* antara penduduk laki-laki dan perempuan di Musi Rawas Utara relatif berimbang, meskipun jumlah penduduk laki-laki cenderung lebih banyak dibanding penduduk perempuan. *Sex ratio* Musi Rawas Utara tahun 2022 tercatat 103,54, artinya di setiap 100 orang penduduk perempuan, terdapat sekitar 103 sampai 104 penduduk laki-laki.

Dari data yang ada, fenomena ini dimungkinkan terjadi karena mata pencaharian penduduk di kecamatan tersebut utamanya adalah pertanian, terutama perkebunan. Bekerja di lapangan usaha perkebunan memang lebih menuntut untuk memiliki fisik kuat, yang umumnya dimiliki oleh laki-laki. Selain itu, budaya patriakri menyebabkan tanah dan rumah diwariskan utamanya kepada anak laki-laki. Maka, penduduk berjenis kelamin perempuan yang berusia produktif umumnya lebih banyak mencari pekerjaan di sektor jasa yang kebanyakan terdapat di wilayah yang lebih padat, seperti Kota Lubuklinggau, Kota Palembang, dan kota besar lainnya.

Kabupaten Musi Rawas Utara sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan tergolong kabupaten dengan kepadatan penduduk yang rendah dibandingkan kota/kabupaten lainnya seperti Kota Palembang. Kepadatan

Kabupaten Musi Rawas Utara pada tahun 2022 mencapai 32,02 jiwa per km², jauh dibawah rata-rata kepadatan nasional yang tercatat sebesar 140 jiwa per km².

Ketidakterrataan persebaran penduduk juga mengindikasikan adanya ketimpangan pembangunan dan daya dukung antar wilayah. Wilayah yang padat penduduk cenderung memiliki daya dukung yang lebih baik, antara lain daya dukung ekonomi, daya dukung fasilitas kesehatan dan pendidikan, serta akses lainnya. Sementara ini, penduduk Musi Rawas Utara masih terkonsentrasi di bagian Kecamatan Rupit.

1. Kondisi Ekonomi

Dari sisi ketenagakerjaan, Kabupaten Musi Rawas Utara menunjukkan usaha yang konsisten dalam menangani tingkat pengangguran. Meskipun dari tahun 2019 ke tahun 2021 mengalami peningkatan, namun hal ini disebabkan oleh pandemi *covid-19* yang menjadi problematika nasional. Tercatat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) kabupaten Musi Rawas Utara pada tahun 2020 dan 2021 adalah 6,9 persen, meningkat 2,4 persen dari tahun 2019 (4,5 persen). Penanggulangan pengangguran ini sudah mulai terlihat hasilnya sejalan dengan mulai jelasnya protokol kesehatan yang harus dijalani, meningkatnya persentase penduduk yang sudah divaksin, dan stimulus-stimulus ekonomi lainnya sehingga pada tahun 2022 Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Musi Rawas Utara turun menjadi 5,4 persen.

Pertanian sebagai kontributor terbesar terbesar perekonomian Musi Rawas Utara, pada sisi tenaga kerja, lapangan usaha pertanian juga merupakan lapangan usaha dengan kapasitas penyerapan tenaga kerja terbesar. Hal ini tercermin dari persentasenya yang berada pada di atas 50 persen atau hampir menyerap setengah dari seluruh tenaga kerja di Musi Rawas Utara. Pada tahun 2022 lapangan usaha di bidang pertanian mengalami peningkatan dan tercatat angkanya menyentuh 59,26 persen. Meningkat 2,08 persen dibandingkan tahun 2021 yang angkanya berada pada level 57,18 persen.

Selama kurun waktu tiga tahun terakhir (2020-2022), tingkat pengeluaran per kapita selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2020, tingkat pengeluaran per kapita tercatat sebesar 883,1 ribu rupiah perkapita

perbulan. Pada tahun 2021 terjadi kenaikan pengeluaran per kapita menjadi 918,5 ribu rupiah perkapita perbulan. Selanjutnya, tingkat pengeluaran per kapita mengalami kenaikan kembali pada tahun 2022 menjadi 969,8 ribu rupiah perkapita perbulan.

Sementara itu, dari sisi kepemilikan tempat tinggal, 82,99 persen penduduk Kabupaten Musi Rawas Utara menempati rumah sendiri. Sebanyak 56,58 persen rumah tangga di Musi Rawas Utara menggunakan sumber air minum bersih, dan 92,43 persen rumah tangga memiliki tempat pembuangan akhir tinja tangki septik.

Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara juga berhasil menunjukkan upaya pengentasan kemiskinan, yang tergambar melalui penurunan jumlah masyarakat miskin yang signifikan dimana pada tahun 2022 jumlah masyarakat miskin adalah 36,65 ribu jiwa, sedangkan pada tahun 2021 berjumlah 39,50 ribu jiwa.

2. Kondisi Pendidikan

Secara umum dalam kurun waktu 5 tahun yaitu dari tahun 2018 sampai tahun 2022, terlihat bahwa kemampuan membaca dan menulis huruf latin penduduk berumur 15-24 tahun di Kabupaten Musi Rawas Utara berada pada level yang cukup tinggi yaitu diatas 96 persen dan mencapai angka tertinggi pada tahun 2022 yaitu sebesar 100 persen.

Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Musi Rawas Utara menunjukan peningkatan dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Pada tahun 2018, rata-rata lama sekolah mencapai 6,45 tahun. Pada tahun-tahun berikutnya besaran RLS mengalami peningkatan hingga mencapai 7,26 tahun pada tahun 2022.

Pada tahun 2022, persentase penduduk 15 tahun ke atas yang tidak memiliki ijazah terbilang cukup tinggi, yakni tercatat 18,58 persen. Jika dibandingkan dengan tahun 2021 terjadi peningkatan persentase sebesar 0,77 persen. Peningkatan terjadi pada persentase penduduk dengan ijazah SMA/MA yaitu meningkat sebesar 1,87 persen. Persentase penduduk dengan ijazah di atas SLTA (Diploma/S1/S2/S3) tercatat sebesar 5,11 persen pada tahun 2022.

Jumlah Sekolah menurut jenjang pendidikan pada periode tahun ajaran 2022/2023 dibandingkan tahun sebelumnya, sebagian besar jumlah sekolah menurut jenjang pendidikan mengalami peningkatan. Peningkatan jumlah sekolah juga tidak terlalu signifikan per jenjang pendidikan. Terjadi penambahan 2 sekolah SD, 1 sekolah MI, 2 sekolah MTs, dan 2 sekolah MA.

3. Kondisi Kesehatan

Berbagai indikator lazim digunakan untuk mengukur derajat dan status kesehatan penduduk. Umur harapan hidup (UHH) merupakan satu di antaranya. Indikator ini juga salah satu indikator penyusun Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Berdasarkan proyeksi penduduk 2010-2035, UHH Penduduk Kabupaten Musi Rawas Utara tercatat menunjukkan peningkatan setiap tahun. Kondisi ini dapat menjadi salah satu cerminan akan semakin baiknya derajat kesehatan penduduk. Pada tahun 2022 jarak antara UHH Kabupaten Musi Rawas Utara dan UHH Sumatera Selatan yaitu sebesar 4,24. UHH penduduk Kabupaten Musi Rawas Utara pada tahun 2022 tercatat mencapai 66,08 tahun. Artinya, secara rata-rata bayi yang baru lahir pada tahun 2022 memiliki peluang untuk bertahan hidup sampai dengan usia sekitar 66 tahun.

Pada tahun 2022, berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS), sebagian besar yaitu sekitar 97,64 persen persalinan ibu hamil telah dibantu oleh tenaga kesehatan yang kompeten di bidangnya, seperti dokter kandungan dan bidan. Pada tahun 2022, tercatat sekitar 71,7 persen kelahiran ditolong oleh bidan dan 25,94 persen oleh dokter kandungan dan dokter umum.

Mencermati angka morbiditas penduduk di Kabupaten Musi Rawas Utara hasil Susenas, tercatat dalam kurun waktu tahun 2018- 2022 persentase penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan rata-rata berada pada angka 21,56 persen sampai ke angka 32,76 persen. Angka kesakitan penduduk Kabupaten Musi Rawas Utara pada tahun 2022 meningkat cukup signifikan sebesar 4,89 poin persen dibandingkan tahun sebelumnya. Tercatat sekitar 13,79 persen penduduk angka kesakitan pada tahun 2022. Hal ini bisa disebabkan banyak hal seperti

kurang istirahat, asupan nutrisi yang tidak tercukupi, efek buruk merokok, sampai terpapar virus.

Menilik tempat berobat jalan yang dipilih oleh penduduk di Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2022, tercatat persentase terbesar pada Puskesmas/Pustu, yakni sekitar 67,08 persen, diikuti oleh Praktek Dokter/Bidan sebesar 21,94 persen, UKBM sebesar 4,18 persen, RS Pemerintah sebanyak 5,03 persen, RS Swasta sebanyak 1,77 persen, serta Klinik/Praktek Dokter Bersama sebesar 0,2 persen.

4. Kondisi Sosial.

Sampai saat ini, pemerintah masih terus mengupayakan berbagai program yang sasarannya adalah golongan masyarakat berpendapatan rendah, sehingga kesejahteraan bersama dapat dicapai. Salah satu program dalam pengentasan kemiskinan adalah pemberian subsidi, dengan harapan kebutuhan pokok bisa terpenuhi sehingga pemanfaatan pendapatan bisa dijadikan sebagai modal peningkatan kapasitas diri atau peningkatan modal usaha.

Selama kurun waktu tiga tahun terakhir persentase penerima Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) selalu mengalami penurunan, pada tahun 2022, persentase penerima BPNT pada Kabupaten Musi Rawas Utara sebanyak 13,58 persen, menurun apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2021 dengan penerima bantuan sebanyak 14,09.

Pada Tahun 2022, penerima bantuan Program Keluarga Harapan adalah 12,86 persen, meningkat dari tahun 2021 yaitu sebesar 11,46. Sejalan pula dengan Program Keluarga Harapan, Program Indonesia Pintar pada tahun 2022 mengalami peningkatan persentase penerima bantuan yaitu sebesar 7,62 persen, meningkat dari tahun sebelumnya dengan penerima bantuan sebesar 5,81 persen.

Secara umum, persentase penduduk berumur 5 tahun keatas yang mengakses internet dalam tiga bulan terakhir di Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2022 tercatat sebesar 49,95 persen. Jika dibandingkan kondisi pada tahun 2020, terjadi peningkatan yang sangat tajam pada tahun 2022.

Apabila kita lihat dari kepemilikan aset rumah tangga di Kabupaten Musi Rawas Utara dapat kita lihat bahwa kepemilikan aset transport selalu lebih tinggi dibandingkan kepemilikan aset fasilitas rumah tangga yang didalamnya juga

termasuk Lemari es/ kulkas, AC, Pemanas air, Televisi layar datar (minimal 30 inci), Tabung Gas, dan Telepon Rumah. Sebanyak 86,96 persen dari rumah tangga di Kabupaten Musi Rawas Utara memiliki aset transportasi pada tahun 2022, sementara kepemilikan aset fasilitas rumah tangga hanya 58,12 persen. Namun, kepemilikan aset rumah tangga ini terus meningkat setiap tahunnya dengan rata-rata pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan aset transportasi.

BAB V
HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Karakteristik Responden

Untuk mengetahui bagaimana keadaan responden sebelum dan sesudah pemekaran wilayah di Kabupaten Musi Rawas Utara, maka digunakan kuesioner yang diukur dengan skala *rating*. Kuesioner yang berisi 60 pertanyaan dengan rincian 15 pertanyaan untuk tiap aspek yang diukur (Ekonomi, Pendidikan, Kesehatan, dan Sosial).

Adapun responden dalam penelitian ini berjumlah 196 orang, dengan rincian 11 orang yang diberikan kuesioner secara langsung oleh peneliti, sedangkan 185 orang diberikan kuesioner melalui formulir google yang dikirimkan melalui aplikasi Whatsapp.

Responden paling banyak berusia 20 – 30 Tahun dengan jumlah 106 orang (54 %) sedangkan paling sedikit berusia 61 – 70 Tahun dan 71 – 80 Tahun dengan jumlah masing-masing 1 orang (1 %). Gambaran spesifik mengenai usia responden disajikan pada Tabel 5.1 berikut ini:

Tabel 5.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Rentang Usia

No.	Rentang Usia Responden	Jumlah	Persentasi (%)
1.	20 – 30 Tahun	106 Responden	54
2.	31 – 40 Tahun	78 Responden	40
3.	41 – 50 Tahun	7 Responden	4
4.	51 – 60 Tahun	3 Responden	2
5.	61 – 70 Tahun	1 Responden	1
6.	71 – 80 Tahun	1 Responden	1
Total		196	

Berdasarkan jenis kelamin responden, terdapat 49% responden laki-laki dengan jumlah 97 responden dan 51% responden perempuan dengan jumlah 99 responden. Responden berdasarkan jenis kelamin ditampilkan melalui Tabel 4.2 berikut ini:

Tabel 5.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentasi (%)
1.	Laki – laki	97 Responden	49
2.	Perempuan	99 Responden	51
Total		196	

Dari latarbelakang pendidikan, responden didominasi lulusan Strata (S1, S2, dan S3) dengan jumlah 96 responden (49%), diikuti oleh responden lulusan SMA sederajat dengan jumlah 52 responden (27%), responden lulusan diploma sebanyak 20 responden (10%), responden lulusan SD sederajat sebanyak 15 responden (8%), dan responden lulusan SMP sederajat sebanyak 13 responden (7%). Selanjutnya, karakteristik responden berdasarkan latarbelakang pendidikan ditampilkan pada Tabel 5.3 berikut ini:

Tabel 5.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah	Persentasi (%)
1.	SD Sederajat	15 Responden	8
2.	SMP Sederajat	13 Responden	7
3.	SMA Sederajat	52 Responden	27
4.	Diploma	20 Responden	10
5.	Strata (1, 2, dan 3)	96 Responden	49
Total		196	

5.2 Hasil Penelitian

Selanjutnya, masing-masing responden diberikan 60 butir pertanyaan pada kuesioner dengan rincian 15 pertanyaan untuk indikator masing-masing aspek penelitian (Kesejahteraan aspek ekonomi, Kesejahteraan aspek pendidikan, Kesejahteraan aspek kesehatan, dan Kesejahteraan aspek sosial). Untuk lebih jelas, berikut ini ditampilkan daftar pertanyaan pada masing-masing aspek penelitian:

Tabel 5.4 Nilai Rata-rata Tingkat Kesejahteraan Aspek Ekonomi Sebelum dan Sesudah Pemekaran Wilayah

No.	Pertanyaan	<i>Mean</i>	
		Pra-Pemekaran	Pasca-Pemekaran
1	Ketersediaan lapangan pekerjaan	3,051	8,204
2	Pengurangan jumlah pengangguran	3,061	8,240
3	Jumlah pendapatan individu	3,144	8,321
4	Pemenuhan kebutuhan dasar individu berupa kebutuhan sandang (Pakaian)	3,179	8,291
5	Pemenuhan kebutuhan dasar individu berupa kebutuhan pangan (Makanan)	3,179	8,291
6	Pemenuhan kebutuhan dasar berupa tempat tinggal	3,179	8,291
7	Keadaan tempat tinggal (atap, dinding, dan lantai)	3,168	8,270
8	Ketersediaan sumber bahan pangan seperti beras, sayur-sayuran, dan peternakan.	3,214	8,221
9	Ketersediaan Bahan Bakar Minyak untuk kebutuhan sehari-hari	3,190	8,281
10	Kualitas fasilitas tempat tinggal berupa Mandi, Cuci, dan Kakus	3,199	8,311
11	Penerangan tempat tinggal	3,200	8,260
12	Ketersediaan sumber energy (listrik) rumah tangga	3,184	8,296
13	Jumlah Pendapatan keluarga secara keseluruhan	3,159	8,224
14	Besaran Pengeluaran Keluarga secara Keseluruhan	3,168	8,250
15	Keseimbangan Pendapatan dan Pengeluaran	3,158	8,296
Rata-rata Total Skor		47,433	124,047

Dalam aspek ekonomi, terdapat 15 pertanyaan yang dijawab oleh responden. Pertanyaan tersebut merupakan indikator dari aspek ekonomi yang diadaptasi dari Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai indikator kesejahteraan ekonomi.

Berdasarkan tabel 5.4 diatas, terlihat peningkatan yang signifikan dari nilai jumlah total jawaban responden sebelum pemekaran dan setelah pemekaran. Sebelum pemekaran wilayah, jumlah total jawaban responden adalah 47,433. Setelah pemekaran nilai jumlah total jawaban responden meningkat menjadi 124,047.

Selisih nilai rata-rata jawaban responden terlihat mengalami kenaikan, dimana pada aspek ekonomi terdapat selisih nilai total rata-rata sebesar 76,61 (mengalami kenaikan sebesar 160%). Dengan demikian, pada aspek kesejahteraan

ekonomi terdapat dampak pemekaran wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara dari Kabupaten Musi Rawas.

Pada aspek ekonomi, perubahan paling signifikan terlihat pada aspek penurunan jumlah pengangguran dimana terdapat peningkatan sebesar 5,179 dari sebelum pemekaran dan setelah pemekaran. Dengan kata lain pemekaran wilayah sangat dirasakan dampak positifnya oleh masyarakat kabupaten Musi Rawas Utara dalam hal pengurangan jumlah pengangguran. Artinya secara eksplisit angka pengangguran di Kabupaten Musi Rawas Utara berkurang secara signifikan setelah pemekaran wilayah. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ammar Hatami dan Darol Arkum bahwa pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) berpengaruh pada kinerja Indeks Pembangunan Manusia terutama penurunan angka pengangguran. (Amar & Arkum, 2021).

Sedangkan peningkatan paling rendah yang dialami masyarakat Musi Rawas Utara adalah pada aspek Ketersediaan sumber bahan pangan seperti beras, sayur- sayuran, dan peternakan dimana peningkatannya adalah 5,007. Pada dasarnya aspek ini tetap mengalami peningkatan signifikan pasca pemekaran wilayah, namun jika dibandingkan dengan aspek lain pada indikator kesejahteraan ekonomi, aspek ini memperoleh nilai paling rendah. Meskipun pertanian merupakan komoditas utama kabupaten Musi Rawas Utara, namun sektor ini bisa mengalami penurunan produktifitas disebabkan oleh beberapa hal seperti meningkatnya arus urbanisasi, rendahnya kesadaran generasi muda untuk menggeluti dunia pertanian, dan minimnya upaya peningkatan produktifitas pertanian pangan melalui penyuluhan-penyuluhan oleh pemerintah (Patunru & Hizkia Respatiadi, 2017).

Sama dengan aspek ekonomi, aspek pendidikan juga terdapat 15 pertanyaan yang dijawab oleh responden. Pertanyaan tersebut merupakan indikator dari aspek pendidikan yang disesuaikan dari buku Indikator Pendidikan di Indonesia, yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Berikut ini ditampilkan daftar pertanyaan kuesioner pada aspek pendidikan:

Tabel 5.5 Nilai Rata-rata Tingkat Kesejahteraan Aspek Pendidikan Sebelum dan Sesudah Pemekaran Wilayah

No.	Pertanyaan	Mean	
		Pra-Pemekaran	Pasca-Pemekaran
1	Akses terhadap Pendidikan (kemudahan untuk memperoleh hak Pendidikan)	3,138	8,311
2	Jenjang pendidikan keluarga	3,143	8,214
3	Keterjangkauan biaya Pendidikan (kemampuan untuk membayar biaya Pendidikan)	3,143	8,282
4	Kondisi fasilitas Pendidikan (Sekolah, ruang belajar, kursi, meja, dan fasilitas lainnya)	3,122	8,284
5	Akses fasilitas pendidikan (apakah fasilitas Pendidikan dapat diakses oleh seluruh peserta didik)	3,143	8,311
6	Kondisi kualitas pendidikan (sistem belajar mengajar di sekolah, akreditasi sekolah, prestasi sekolah)	3,117	8,286
7	Kondisi kualitas guru dan tenaga pendidikan di sekolah	3,128	8,270
8	Keterjangkauan jarak dari rumah ke sekolah	3,189	8,301
9	Kemudahan siswa/anak dalam memperoleh buku pelajaran, paket, dan LKS	3,179	8,367
10	Komunikasi antara pihak sekolah dan orang tua siswa dalam proses pembelajaran siswa	3,077	8,226
11	Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan Pendidikan seperti komite sekolah	3,077	8,128
12	Akses pendidikan non-formal (Paket A, B, C, dan Kursus/Pelatihan)	3,123	8,260
13	Kuantitas pendidikan pra-sekolah (PAUD, KB, TK, dan RA)	3,128	8,245
14	Kualitas Pendidikan pra-sekolah (PAUD, KB, TK, dan RA)	3,107	8,224
15	Kesadaran masyarakat dan penyelenggara Pendidikan terhadap Pendidikan yang non-diskriminasi (tidak membeda-bedakan siswa berdasarkan Suku, Agama, dan Ras tertentu)	3,179	8,306
Rata-rata Total Skor		46,993	124,015

Peningkatan yang signifikan juga terlihat pada nilai jumlah total jawaban responden dalam aspek pendidikan. Hal ini ditunjukkan dengan jumlah total jawaban responden sebelum pemekaran adalah 46,993, meningkat menjadi 124,015 setelah pemekaran.

Rata – rata total skor pada aspek pendidikan memiliki selisih sebesar 77,02 (mengalami kenaikan sebesar 163%). Dengan demikian, pada aspek

kesejahteraan pendidikan terdapat dampak pemekaran wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara dari Kabupaten Musi Rawas.

Pada aspek pendidikan, perubahan paling signifikan terlihat pada aspek kemudahan siswa/anak dalam memperoleh buku pelajaran, paket, dan LKS dimana terdapat peningkatan sebesar 5,188 dari sebelum pemekaran dan setelah pemekaran. Peningkatan ini merupakan dampak dari pemerataan fasilitas pendidikan sebagai dampak dari pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) (Novita, 2020).

Sedangkan tingkat perubahan paling rendah pada aspek pendidikan yang dirasakan masyarakat Kabupaten Musi Rawas Utara adalah pada aspek keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pendidikan seperti komite sekolah (5,051). Hal ini memang perlu mendapat perhatian khusus meskipun tetap mengalami peningkatan signifikan pasca pemekaran wilayah. Ini menjadi tanggung jawab dari penyelenggara sekolah sebab pendidikan yang baik sejatinya adalah pendidikan yang melibatkan semua elemen masyarakat (Normina, 2016).

Pada aspek kesehatan, sebanyak 15 pertanyaan diajukan dalam kuesioner kepada responden, dimana pertanyaan-pertanyaan tersebut disesuaikan dengan Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Tabel 5.6 Nilai Rata-rata Tingkat Kesejahteraan Aspek Kesehatan Sebelum dan Sesudah Pemekaran Wilayah

No.	Pertanyaan	<i>Mean</i>	
		Pra-Pemekaran	Pasca Pemekaran
1	Kemampuan untuk mendapatkan layanan Kesehatan dari rumah sakit, puskesmas, atau poskesdes	3,122	8,301
2	Kualitas fasilitas Kesehatan (Rumah Sakit, Puskesmas, atau Puskesmas)	3,143	8,301
3	Keterjangkauan biaya berobat (kemampuan untuk membayar biaya pengobatan di Rumah Sakit, Puskesmas, atau Puskesmas)	3,092	8,297
4	Penurunan tingkat kematian bayi	3,138	8,281
5	Penurunan jumlah balita gizi buruk, kurus dan sangat kurus, pendek dan sangat pendek, dan balita gemuk	3,128	8,306

6	Pengentasan dan penurunan angka penyakit diare, pnemonia, hipertensi, gangguan mental, asma, penyakit gigi dan mulut, disabilitas, cedera, penyakit sendi, dan ISPA	3,133	8,332
7	Perilaku Hidup Bersih dan Sehat secara individu	3,209	8,357
8	Pengurangan kebiasaan merokok	3,240	8,204
9	Akses terhadap air bersih	3,224	8,327
10	Kesadaran untuk menjaga lingkungan sekitar tempat tinggal	3,265	8,304
11	Kualitas penanganan persalinan	3,133	8,301
12	Kemudahan akses imunisasi bagi anak-anak	3,117	8,287
13	Jumlah Rumah Sakit	3,056	8,250
14	Kualitas Bidan Desa dalam menangani keluhan mengenai kesehatan	3,092	8,199
15	Kualitas pelayanan Kesehatan pada puskesmas	3,117	8,265
Rata-rata Total Skor		47,209	124,312

Pada aspek kesejahteraan kesehatan, pemekaran wilayah juga menunjukkan dampak yang positif dengan meningkatnya jumlah rata – rata total skor jawaban responden sebelum pemekaran yaitu 47,209 dan meningkat menjadi 124,312 setelah pemekaran. Rata – rata total skor pada aspek kesehatan selisih 77,10 (mengalami kenaikan sebesar 163%), Hal ini menunjukkan perbedaan yang signifikan antara nilai rata-rata jawaban responden sebelum dan setelah pemekaran terdapat pengaruh pemekaran wilayah terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Musi Rawas Utara.

Pada sektor kesehatan, peningkatan paling signifikan yang dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Musi Rawas Utara sebagai dampak dari pemekaran wilayah adalah pada aspek Keterjangkauan biaya berobat (kemampuan untuk membayar biaya pengobatan di Rumah Sakit, Puskesmas, atau Puskesmasdes) dengan peningkatan sebesar 5,205. Upaya pemerataan pembangunan pasca pemekaran pada aspek kesehatan paling banyak memprioritaskan pembangunan fasilitas kesehatan sehingga berdampak terhadap penurunan biaya berobat masyarakat (Rorong, 2018).

Sedangkan aspek yang paling kurang dirasakan masyarakat yang diindikasikan dengan nilai perubahan yang paling rendah (4,964) adalah pada

aspek pengurangan kebiasaan merokok. Sejalan dengan hasil survey Badan Pusat Statistik Kabupaten Musi Rawas Utara pada tahun 2023 bahwa pengeluaran terbesar kabupaten Musi Rawas Utara adalah untuk makanan dan minuman jadi (143.967), untuk rokok dan tembakau (79.946) dan untuk padi-padian (79.615) (Badan Pusat Statistik, 2023).

Selanjutnya, sebanyak 15 pertanyaan pada aspek sosial diajukan dalam kuesioner kepada responden. Pertanyaan-pertanyaan tersebut diadaptasi dari Indikator Kesejahteraan Sosial yang diterbitkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Berikut ini adalah daftar pertanyaan yang diajukan kepada responden pada aspek sosial:

Tabel 5.7 Nilai Rata-rata Tingkat Kesejahteraan Aspek Sosial Sebelum dan Sesudah Pemekaran Wilayah

No.	Pertanyaan	Mean	
		Pra-Pemekaran	Pasca-Pemekaran
1	Penurunan tingkat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	3,148	8,276
2	Penanganan dan penurunan tingkat kejahatan	3,163	8,282
3	Pemanfaatan waktu luang setelah bekerja untuk rekreasi	3,168	8,168
4	Kemudahan terhadap akses terhadap fasilitas ibadah	3,200	8,311
5	Kemudahan terhadap akses fasilitas olahraga	3,148	8,306
6	Kemudahan terhadap akses tempat bermain anak	3,117	8,263
7	Kemudahan terhadap akses transportasi umum	3,179	8,357
8	Keterjangkauan biaya transportasi umum	3,128	8,374
9	Kemudahan terhadap akses internet	3,102	8,413
10	Keterbukaan informasi publik	3,015	8,342
11	Penanganan penggunaan dan penyebaran Narkotika, Psikotropika, dan Zat Aditif Lainnya (NAPZA)	3,087	8,303
12	Kesetaraan antara peran laki-laki dan perempuan dalam kehidupan bermasyarakat	3,112	8,362
13	Penanganan dan penurunan tingkat kekerasan terhadap anak	3,087	8,347
14	Penurunan tingkat pekerja usia anak	3,092	8,362
15	Urusan administrasi masyarakat ke instansi pelayanan publik	2,990	8,398
Rata-rata Total Skor		46,736	124,864

Pada aspek kesejahteraan sosial, pemekaran wilayah menunjukkan dampak yang positif dengan meningkatnya jumlah rata – rata total skor jawaban responden sebelum pemekaran yaitu 46,736 dan meningkat menjadi 124,864

setelah pemekaran. Rata – rata total skor pada aspek sosial terdapat selisih 78,12 (mengalami kenaikan sebesar 165%), Hal ini menunjukkan perbedaan yang signifikan antara nilai nilai total rata-rata jawaban responden sebelum pemekaran wilayah dan setelah pemekaran wilayah. Artinya, terdapat pengaruh pemekaran wilayah terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Musi Rawas Utara.

Sektor kesejahteraan sosial merupakan salah satu sektor yang paling diperhatikan oleh pemerintah pasca pemekaran wilayah. Berdasarkan pertanyaan pada aspek kesejahteraan sosial, peningkatan paling signifikan yang dirasakan masyarakat adalah pada pertanyaan urusan administrasi masyarakat ke instansi pelayanan publik yaitu sebesar 5,408. Sedangkan pertanyaan yang dirasakan paling sedikit dampaknya adalah pemanfaatan waktu luang setelah bekerja untuk rekreasi yaitu sebesar 5,000. Sektor pariwisata memang masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah sebab menurut laporan *United Nations – World Tourism Organization* (UN-WTO) pada tahun 2019 masyarakat Indonesia termasuk kategori masyarakat kurang piknik dengan 2,6 kali perjalanan dalam setahun (United Nation - World Tourism Organization, 2019)

Semua data yang akan dianalisis perlu diuji apakah berdistribusi normal atau tidak. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan dalam analisis normalitas data yaitu Liliefors, kolmogorof-smirnov, chi square, dan sebagainya (Nuryadi et al, 2017). Dalam penelitian ini menggunakan metode kolmogorof-smirnov yaitu suatu tes *goodness-of-fit*. Artinya, yang diperhatikan adalah tingkat kesesuaian antara distribusi teoritis tertentu. Tes ini menetapkan apakah skor-skor dalam sampel dapat secara masuk akal dianggap berasal dari suatu populasi dengan distributif tertentu tersebut.

Pedoman pengambilan keputusan dalm uji normalitas adalah sebagai berikut:

- a) Nilai P. atau signifikasi atau nilai probabilitas $< 0,05$ maka distribusi adalah tidak normal.
- b) Nilai P. atau signifikasi atau nilai probabilitas $> 0,05$ maka distribusi adalah normal.

- c) Setelah uji normalitas dilakukan selanjutnya data diolah menggunakan uji beda dua sampel berpasangan dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) Apabila data berdistribusi normal digunakan uji t (*paired sample t-test*).
 - 2) Apabila data tidak berdistribusi normal digunakan uji Wilcoxon *signed rank test* (uji non parametrik).

Pada Tabel 5.8 berikut ini disajikan hasil uji normalitas dari masing-masing aspek sebelum dan sesudah pemekaran wilayah:

Tabel 5.8 Hasil Uji Normalitas Data

No	Variabel	<i>P-Value</i>	Keterangan
1	Nilai Ekonomi Pra Pemekaran	0,001	Tidak Normal
	Nilai Ekonomi Pasca Pemekaran	0,001	Tidak Normal
2	Nilai Pendidikan Pra Pemekaran	0,001	Tidak Normal
	Nilai Pendidikan Pasca Pemekaran	0,001	Tidak Normal
3	Nilai Kesehatan Pra Pemekaran	0,001	Tidak Normal
	Nilai Kesehatan Pasca Pemekaran	0,001	Tidak Normal
4	Nilai Sosial Pra Pemekaran	0,001	Tidak Normal
	Nilai Sosial Pasca Pemekaran	0,001	Tidak Normal

Sumber: Data diolah peneliti dari hasil analisis software pengolah data statistik

Setelah dilakukan uji normalitas data dengan metode Kolmogorov-smirnof menggunakan aplikasi software pengolah data statistik, seperti yang disajikan pada tabel 4.2 terlihat bahwa *P-Value* dari aspek ekonomi sebelum dan sesudah pemekaran adalah 0,001, *P-Value* aspek pendidikan sebelum dan sesudah pemekaran adalah 0,001, *P-Value* aspek kesehatan sebelum dan sesudah pemekaran adalah 0,001, dan *P-Value* aspek sosial sebelum dan sesudah pemekaran adalah 0,001.

Dari analisis data tersebut didapatkan kesimpulan bahwa data berdistribusi tidak normal sebab masing-masing variabel memiliki nilai signifikansi $<0,05$, sehingga langkah berikutnya adalah melakukan uji beda

menggunakan uji non-parametrik *Wilcoxon Signed Rank Test*. Uji beda dilakukan untuk menguji hipotesis penelitian apakah pemekaran wilayah memberikan pengaruh signifikan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Musi Rawas Utara atau tidak.

Setelah data dari hasil jawaban responden didapatkan, maka peneliti melakukan analisis data dengan menggunakan software pengolah data statistik, hasil analisis peneliti terhadap jawaban responden disajikan pada tabel 5.9 berikut ini:

Tabel 5.9 Simpulan Data dan Hasil Uji Statistik Terhadap Dampak Pemekaran Wilayah Menurut Aspek Ekonomi, Pendidikan, Kesehatan, dan Sosial

No	Variabel	Mean	Median	Min-Max	Standar Deviasi	Mean Different	<i>P-Value</i> Uji Beda
1	Nilai Ekonomi Pra-Pemekaran	47,78	46,00	15,00-75,00	12,58	76,61	0,001
	Nilai Ekonomi Pasca-Pemekaran	124,00	120,50	76,00-150,00	16,13		
2	Nilai Pendidikan Pra-Pemekaran	47,19	45,00	15,00-75,00	12,34	77,02	0,001
	Nilai Pendidikan Pasca-Pemekaran	124,05	120,50	90,00-150,00	15,40		
3	Nilai Kesehatan Pra-Pemekaran	47,25	45,00	15,00-75,00	12,21	77,10	0,001
	Nilai Kesehatan Pasca-Pemekaran	124,46	121,00	90,00-150,00	15,05		
4	Nilai Sosial Pra-Pemekaran	47,19	45,00	15,00-75,00	12,38	78,12	0,001
	Nilai Sosial Pasca-Pemekaran	125,24	123,00	75,00-150,00	15,09		

Sumber: Data diolah oleh peneliti dari hasil software pengolah data statistik

Rata-rata jawaban responden terhadap pertanyaan pada aspek ekonomi sebelum pemekaran adalah 47,78, sedangkan setelah pemekaran rata-rata jawaban responden adalah 124,00. Nilai median yang muncul adalah 46,00 untuk sebelum pemekaran, dan 120,50 setelah pemekaran. Nilai minimum sebelum pemekaran adalah 15,00, sedangkan nilai maksimum sebelum pemekaran adalah 75,00. Nilai minimum setelah pemekaran adalah 76,00, dan nilai maksimum setelah pemekaran adalah 150,00. Standar deviasi sebelum

pemekaran adalah 12,58, sedangkan standar deviasi setelah pemekaran adalah 16,13.

Sama dengan aspek ekonomi, aspek pendidikan juga terdapat 15 pertanyaan yang dijawab oleh responden. Pertanyaan tersebut merupakan indikator dari aspek pendidikan yang disesuaikan dari buku Indikator Pendidikan di Indonesia, yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Nilai rata-rata (mean) dari jawaban responden terhadap pertanyaan pada aspek pendidikan sebelum pemekaran adalah 47,19, sedangkan setelah pemekaran rata-rata jawaban responden adalah 124,05. Nilai median sebelum pemekaran adalah 45,00, sedangkan setelah pemekaran adalah 120,50. Nilai minimum sebelum pemekaran adalah 15,00, sedangkan nilai maksimum sebelum pemekaran adalah 150,00. Nilai minimum setelah pemekaran adalah 90,00, dan nilai maksimum sebelum pemekaran adalah 75,00. Standar deviasi sebelum pemekaran adalah 12,34, sedangkan standar deviasi setelah pemekaran adalah 15,40.

Pada aspek kesehatan, sebanyak 15 pertanyaan diajukan dalam kuesioner kepada responden, dimana pertanyaan-pertanyaan tersebut disesuaikan dengan Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Rata-rata jawaban responden terhadap pertanyaan pada aspek kesehatan sebelum pemekaran adalah 47,25, sedangkan rata-rata setelah pemekaran adalah 124,46. Nilai median sebelum pemekaran adalah 45,00 dan median setelah pemekaran adalah 121,00. Nilai terendah sebelum pemekaran adalah 15,00, sedangkan nilai terendah sesudah pemekaran adalah 90,00. Nilai tertinggi sebelum pemekaran adalah 75,00, Setelah pemekaran wilayah, nilai tertinggi adalah 150,00. Standar deviasi sebelum pemekaran adalah 12,21, sedangkan setelah pemekaran adalah 15,05.

Sebanyak 15 pertanyaan pada aspek sosial diajukan dalam kuesioner kepada responden. Pertanyaan-pertanyaan tersebut diadaptasi dari Indikator Kesejahteraan Sosial yang diterbitkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia.

Rata-rata jawaban responden terhadap pertanyaan pada aspek sosial adalah 47,19 sebelum pemekaran dan 125,24 untuk setelah pemekaran. Nilai maksimal sebelum pemekaran adalah 75,00, sedangkan nilai maksimal setelah pemekaran adalah 150,00. Nilai minimal sebelum pemekaran adalah 15,00, sedangkan nilai minimal setelah pemekaran adalah 75,00. Nilai standar deviasi sebelum pemekaran adalah 12,38, sedangkan nilai standar deviasi setelah pemekaran adalah 15,09. Nilai median sebelum pemekaran adalah 45,00, sedangkan nilai median setelah pemekaran adalah 123,00.

Berdasarkan data yang ditampilkan pada tabel diatas, dapat diketahui bahwa nilai signifikansi dari masing-masing aspek adalah $0,000 < 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan pada tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Musi Rawas Utara sebelum dan setelah pemekaran wilayah.

5.3 Pembahasan

5.3.1 Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat pada Aspek Ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi juga sebagai sebuah proses peningkatan output dari waktu ke waktu menjadi indikator penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan suatu negara. Tingkat kesejahteraan ekonomi suatu daerah dapat dilihat dari ketersediaan lapangan kerja, pendapatan masyarakat, pemenuhan kebutuhan masyarakat, dan kualitas fasilitas yang merupakan hajat hidup. Daerah yang lebih sejahtera umumnya tingkat yang lebih tinggi dalam aspek tersebut. Berdasarkan hasil uji beda didapatkan hasil nilai signifikansi $0.00 < 0.05$ sehingga dapat dikatakan bahwa pemekaran wilayah memberikan dampak positif pada kesejahteraan masyarakat aspek ekonomi.

Seperti yang terlihat pada rata-rata jawaban responden terhadap pertanyaan kuesioner bahwa terdapat perubahan signifikan pada tingkat kesejahteraan ekonomi sebelum dan setelah pemekaran wilayah. Hal ini sejalan dengan pendapat Khalid (2012) pasca terbentuknya DOB terdapat peluang yang besar bagi akselerasi pembangunan ekonomi.

Bukan hanya infrastruktur pemerintahan yang terbangun, tetapi juga infrastruktur fisik yang menyertainya, seperti infrastruktur jalan, transportasi, komunikasi dan sejenisnya. Selain itu, kehadiran pemerintah DOB juga memungkinkan lahirnya infrastruktur kebijakan pembangunan ekonomi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Semua infrastruktur ini membuka peluang yang lebih besar bagi wilayah hasil pemekaran untuk mengakselerasi pembangunan ekonomi.

Pembangunan ekonomi sebagai salah satu orientasi pembangunan suatu daerah bisa dioptimalkan dengan pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB). Berdasarkan jawaban dari responden, pemekaran wilayah telah memberikan dampak positif yang signifikan pada aspek ekonomi.

5.3.2 Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat pada Aspek Pendidikan

Dampak pemekaran terhadap kesejahteraan masyarakat pada aspek pendidikan yang diteliti dalam penelitian ini adalah akibat-akibat yang dirasakan masyarakat terhadap kehidupan mereka. Kabupaten Musi Rawas Utara sebelum dimekarkan belum memiliki Sekolah Dasar di setiap Desa, setelah dimekarkan semua Desa telah memiliki Sekolah Dasar. Hal ini menyebabkan pertambahan kuantitas sekolah, pengurangan jarak tempuh, dan distribusi guru yang lebih merata. Adapun hal yang berkaitan dengan fasilitas pendidikan, kualitasnya telah dilakukan upaya perbaikan dari waktu ke waktu, sehingga masyarakat mampu menikmati pendidikan yang berkualitas, demi masa depan yang lebih baik.

Berdasarkan hasil uji beda didapatkan hasil nilai signifikansi $0.00 < 0.05$ sehingga dapat dikatakan bahwa pemekaran wilayah memberikan dampak positif pada kesejahteraan masyarakat aspek pendidikan. Rata-rata jawaban responden terhadap pertanyaan kuesioner menunjukkan perubahan yang signifikan sebelum dan setelah pemekaran. Perubahan ini dapat diinterpretasikan sebagai dampak positif dari pemekaran wilayah terhadap kesejahteraan masyarakat pada aspek pendidikan.

Setelah terbentuknya Daerah Otonom Baru, masyarakat merasakan dampak yang signifikan dalam aspek pendidikan. Indikator yang paling tinggi

adalah kemudahan siswa untuk mendapatkan buku sekolah, buku paket, dan LKS (8.286), sedangkan indikator terendah adalah kondisi fasilitas pendidikan (8.145).

Kebijakan pemekaran wilayah memberikan dampak positif bagi kemajuan pendidikan suatu daerah. Peningkatan pendidikan yang disertai dengan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan juga mampu memberikan manfaat bagi keadaan-keadaan diluar sasaran kebijakan, terlihat dari pengurangan-pengurangan biaya langsung tertentu yang harus dikeluarkan oleh masyarakat untuk pendidikan (Samidu, M. A., Dengo, S., & Kolondam, 2016). Sejalan dengan penelitian ini, peneliti menemukan kemudahan-kemudahan yang dirasakan oleh masyarakat pada aspek pendidikan setelah pemekaran wilayah, diantaranya adalah biaya pendidikan yang lebih terjangkau dan fasilitas pendidikan berupa buku paket dan LKS yang lebih mudah diakses oleh peserta didik.

Menurut data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Musi Rawas Utara, pada tahun 2023 terdapat total 74 yayasan yang mengelola pendidikan formal dan non-formal, menunjukkan progres yang baik mengingat pada aspek pendidikan, responden yang merupakan representasi dari masyarakat Musi Rawas Utara memberikan penilaian paling rendah untuk indikator akses pendidikan non-formal berupa paket A, B, C, dan pelatihan serta kursus keahlian.

Pemekaran wilayah diharapkan mampu meningkatkan kualitas Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK). Peningkatan kualitas ini akan sejalan dengan peningkatan kinerja, yang berujung kepada peningkatan kualitas pendidikan (Giantoro et al., 2019). Pada penelitian ini terlihat perubahan yang signifikan antara kualitas GTK sebelum dan sesudah pemekaran, sehingga dapat dikatakan bahwa pemekaran wilayah berpengaruh positif terhadap kesejahteraan pendidikan masyarakat Musi Rawas Utara.

5.3.3 Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat pada Aspek Kesehatan

Dengan adanya pemekaran wilayah tingkat kesehatan semakin membaik dimana masyarakat lebih mudah dalam memperoleh akses kesehatan dibandingkan sebelum dilakukan pemekaran wilayah dengan didukung oleh data rata-rata jawaban responden terhadap pertanyaan yang ada dalam kuesioner. Hal ini sejalan dengan teori yang diungkapkan oleh Irawan, dkk (2007) berpendapat bahwa pentingnya kesehatan bagi masyarakat karena kesehatan merupakan salah satu unsur penting dari kesejahteraan masyarakat usaha pembangunan tidak akan berjalan dengan lancar bilamana kesehatan masyarakat banyak terganggu.

Berdasarkan hasil uji beda didapatkan hasil nilai signifikansi $0.00 < 0.05$ sehingga dapat dikatakan bahwa pemekaran wilayah memberikan dampak positif pada kesejahteraan masyarakat aspek kesehatan. Rata-rata jawaban responden terhadap pertanyaan kuesioner menunjukkan perubahan yang signifikan sebelum dan setelah pemekaran. Perubahan ini dapat diinterpretasikan sebagai dampak positif dari pemekaran wilayah terhadap kesejahteraan masyarakat pada aspek kesehatan.

Sarana kesehatan sebelum pemekaran di Kabupaten Musi Rawas Utara hanya memiliki Puskesmas Pembantu sebanyak 1 unit di setiap desa (data fasilitas kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas Utara), sedangkan setelah pemekaran dilakukan bertambah sarana kesehatan berupa Rumah Sakit Umum Daerah dan posyandu. Pembangunan kesehatan di Musi Rawas Utara dititik beratkan pada peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat dan terwujudnya keluarga bahagia dan sejahtera, dengan melihat dari tingkat kesejahteraan penduduk suatu daerah atau Negara. Semakin baik tingkat kesehatan seseorang maka, hal ini cenderung akan lebih meningkatkan produktivitas seseorang yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraannya.

Adanya suatu pemekaran wilayah tersebut sangat berdampak positif untuk kesehatan masyarakat. dengan adanya pemekaran wilayah dapat meningkatkan sarana kesehatan masyarakat, artinya disamping jaraknya sudah

semakin dekat dengan rumah warga, juga pelayanan kepada masyarakat menjadi sangat baik karena pelayanannya bukan saja berdasarkan pada hubungan formal tetapi juga hubungan informal, sehingga masyarakat merasa puas dilayani. Sebelum pemekaran dilakukan sarana kesehatan berupa Rumah Sakit boleh dikatakan tidak ada sama sekali, sehingga masyarakat harus menempuh jarak yang cukup jauh untuk melakukan pemeriksaan penyakit yang tidak tertangani oleh Puskesmas Pembantu. Sarana kesehatan lain adalah berupa posyandu yang berjalan sampai saat ini mendukung tingkat kesejahteraan masyarakat, ibu hamil, bayi dan balita semakin sehat, sehat sehingga tidak ada kendala yang dapat menyebabkan seorang ibu hamil dan bayi meninggal akibat penanganan yang kurang maksimal. Dengan semakin tingginya kesehatan ibu dan anak membuat sarana kesehatan lebih baik dan tingkat kesejahteraan terlaksana sesuai tujuan yang diinginkan menciptakan masyarakat yang sehat.

Salah satu indikator yang berkaitan dengan aspek kesehatan adalah jumlah balita gizi buruk, kurus dan sangat kurus, pendek dan sangat pendek, dan balita gemuk. Indikator ini berkaitan dengan pengentasan *stunting*, yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah bidang kesehatan. Pada penelitian ini, peneliti menemukan data rata-rata jawaban responden untuk indikator ini adalah 3.135 sebelum pemekaran. Strategi penurunan prevalensi *underweight* pada bayi adalah dengan revitalisasi puskesmas dan posyandu, yang harus dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan lintas sektor di kabupaten/kota (Kalsum & Jahari, 2015). Kebijakan pemekaran wilayah telah menunjukkan dampak positif dengan upaya peningkatan kualitas layanan puskesmas dan posyandu sehingga setelah pemekaran rata-rata jawaban responden pada indikator pertanyaan Penurunan jumlah balita gizi buruk, kurus dan sangat kurus, pendek dan sangat pendek, dan balita gemuk menjadi 8.302, rata-rata tertinggi kedua setelah kualitas pelayanan kesehatan pada puskesmas.

Pemanfaatan posyandu sebagai salah satu sarana kesehatan dipengaruhi oleh factor dominan yaitu tingkat pendidikan orang tua, pekerjaan ayah, dan tingkat sosial ekonomi keluarga (Kalsum, 2013). Melalui kebijakan pemekaran wilayah, level pendidikan yang meningkat, pekerjaan yang layak, dan

peningkatan kondisi sosial dan ekonomi keluarga dapat diwujudkan sehingga fungsi posyandu benar-benar dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat.

5.3.4 Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat pada Aspek Sosial

Berdasarkan hasil uji beda didapatkan hasil nilai signifikansi $0.00 < 0.05$ sehingga dapat dikatakan bahwa pemekaran wilayah memberikan dampak signifikan dan positif pada kesejahteraan masyarakat aspek sosial. Rata-rata jawaban responden terhadap pertanyaan kuesioner menunjukkan angka yang lebih tinggi setelah pemekaran dibandingkan dengan sebelum pemekaran. Perubahan ini secara komprehensif dimaknai sebagai dampak positif dari pemekaran wilayah terhadap kesejahteraan masyarakat pada aspek sosial.

Salah satu peran utama kesejahteraan sosial adalah memberikan perlindungan sosial bagi individu dan keluarga yang berada dalam kondisi membutuhkan bantuan. Ini melibatkan pendirian dan implementasi program-program bantuan sosial yang dirancang untuk memberikan jaring pengaman sosial bagi mereka yang membutuhkan.

Penurunan angka kriminal sebagai salah satu indikator kesejahteraan sosial mengalami perubahan paling signifikan dari tahun ke tahun, bahkan pada tahun 2022 terjadi penurunan sebesar 28,72 persen (Data Kepolisian Resort Musi Rawas Utara, Rupit). Hal ini adalah pencapaian yang luar biasa mengingat Musi Rawas Utara sebelumnya dikenal sebagai daerah yang memiliki angka kriminalitas yang tinggi.

Angka kekerasan terhadap anak juga mengalami penurunan yang konsisten. Hingga Juni 2023 tercatat hanya ada 1 kasus kekerasan terhadap anak yang dilaporkan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak (DPMD-P3A) Kabupaten Musi Rawas Utara.

Perubahan kondisi sosial ke arah yang lebih baik dipengaruhi oleh konstruksi sosial yang dibangun dari interaksi sosial yang baik antar individu (Haryadi et al., 2016). Melalui pemekaran wilayah, interaksi sosial yang baik terlihat dari meningkatnya total rata-rata jawaban responden sebelum pemekaran (3,153) menjadi 8,298 setelah pemekaran.

Berdasarkan pada pengalaman langsung peneliti dalam proses penelitian ini, ada beberapa keterbatasan yang dialami dan dapat menjadi beberapa faktor yang agar dapat untuk lebih diperhatikan bagi peneliti-peneliti yang akan datang dalam lebih menyempurnakan penelitiannya karena penelitian ini sendiri tentu memiliki kekurangan yang perlu terus diperbaiki dalam penelitian-penelitian kedepannya. Beberapa keterbatasan dalam penelitian tersebut, antara lain :

1. Jumlah responden yang hanya 196 orang, tentunya masih kurang untuk merepresentasikan keadaan yang sesungguhnya, mengingat penduduk Kabupaten Musi Rawas Utara 194.405 jiwa.
2. Dalam proses pengambilan data, informasi yang diberikan responden melalui kuesioner terkadang tidak menunjukkan pendapat responden yang sebenarnya, hal ini terjadi karena kadang perbedaan pemikiran, anggapan dan pemahaman yang berbeda tiap responden, juga faktor lain seperti faktor kejujuran dalam pengisian pendapat responden dalam kuesionernya.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan pada penelitian di atas, maka dihasilkan kesimpulan bahwa sebagai berikut :

1. Terdapat perbedaan yang signifikan antara tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Musi Rawas Utara pada aspek ekonomi sebelum dan setelah pemekaran wilayah. Rata-rata jawaban responden menunjukkan peningkatan kesejahteraan pada aspek ekonomi sehingga dapat disimpulkan bahwa pemekaran wilayah memberikan dampak positif bagi kesejahteraan ekonomi masyarakat Kabupaten Musi Rawas Utara. Peningkatan paling signifikan pada aspek ekonomi terlihat pada penurunan jumlah pengangguran, sedangkan peningkatan yang paling rendah adalah kecukupan bahan makanan pertanian dan peternakan.
2. Ada perbedaan tingkat kesejahteraan masyarakat pada Aspek Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Utara sebelum dan setelah pemekaran wilayah dari Kabupaten Musi Rawas. Pemekaran wilayah memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Musi Rawas Utara. Peningkatan paling signifikan pada aspek pendidikan terlihat pada kemudahan mendapatkan buku paket dan LKS, sedangkan peningkatan yang paling rendah adalah partisipasi masyarakat dalam dunia pendidikan seperti komite sekolah.
3. Ada perbedaan tingkat kesejahteraan masyarakat pada Aspek Kesehatan Kabupaten Musi Rawas Utara sebelum dan setelah pemekaran wilayah dari Kabupaten Musi Rawas. Pemekaran wilayah memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Musi Rawas Utara. Peningkatan paling signifikan pada aspek kesehatan terlihat pada keterjangkauan biaya berobat, sedangkan peningkatan yang paling rendah adalah pengurangan kebiasaan merokok.
1. Ada perbedaan tingkat kesejahteraan masyarakat pada Aspek Sosial Kabupaten Musi Rawas Utara sebelum dan setelah pemekaran wilayah

dari Kabupaten Musi Rawas. Pemekaran wilayah memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Musi Rawas Utara. Peningkatan paling signifikan pada aspek sosial terlihat pada kemudahan urusan administrasi masyarakat ke instansi pelayanan publik, sedangkan peningkatan yang paling rendah adalah pemanfaatan waktu luang setelah bekerja untuk rekreasi.

6.2 Saran

2. Pemekaran wilayah merupakan sebuah kebijakan otonomi yang memberi dampak positif untuk pembangunan sebuah daerah, namun juga diperlukan upaya yang optimal dari pemerintah DOB (Daerah Otonom Baru) agar pembangunan menuju kesejahteraan merata dan dinikmati oleh seluruh masyarakat
3. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi penelitian berikutnya, serta sebagai masukan bagi peneliti lainnya yang mengkaji tentang dampak pemekaran wilayah terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat pada aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan sosial. Penelitian tentang pemekaran wilayah seyogyanya selalu dikembangkan, mengingat pembentukan Daerah Otonom Baru merupakan langkah konkret untuk pembangunan yang berorientasi pada desentralisasi dan otonomi daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Agusniar, A. (2006). *Analisis Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Perekonomian Wilayah dan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus di Kabupaten Aceh Singkil Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam)*. Institut Pertanian Bogor.
- Amar, H., & Arkum, D. (2021). Perbandingan kinerja Pembangunan Manusia dan Sosial Ekonomi Pasca Pemekaran Wilayah. *Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 9(2), 55–63. <https://doi.org/10.31289/publika.v9i2.5938>
- Ashworth, P. D., & Saxton, J. (2006). On Competence. *Journal of Further and Higher Education*, 37–41. <https://doi.org/10.1080/0309877900140201>
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Indikator Kesejahteraan Masyarakat Musi Rawas Utara 2023*.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Musi Rawas Utara. (2020). *Jumlah Penduduk Kabupaten Musi Rawas Utara 2014-2020*.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Musi Rawas Utara. (2021). *Pendapatan Perkapita Kabupaten Musi Rawas Utara 2013-2021*.
- Bappenas-UNDP. (2008). *Evaluation of The Proliferation of Administrative Region in Indonesia, 2001-2007*.
- Bhakti, N. A., Istiqomah, & Suprpto. (2017). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia Di Indonesia Periode 2008-2012. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 18(4), 452. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2014.v18.i4.2162>
- Anonim. (2012). *Enam Alasan Pemekaran/Pembentukan Daerah Otonom*. Retrieved from <http://phylopop.com>
- Bhakti, N. I. (2014). . Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi indeks pembangunan manusia di indonesia periode 2008-2012. *Ekuitas, Jurnal Ekonomi dan Keuangan*.
- Boorse, C. (2012). Welfare Theory. *Philosophy of Medicine*, 35.
- Budiati, I., Larasaty, P., Setiyawati, N., Pratiwi, A. I., Anam, C., & Hastuti, A. (2021). *Indikator Kesejahteraan Rakyat*. 4–15.

- Cheema, G. S., & Rondinelli, D. A. (2007). Decentralizing Governance. In *Global Encyclopedia of Public Administration, Public Policy, and Governance* (Editor Ser). Brooking Institution Press. https://doi.org/10.1007/978-3-319-31816-5_3918-1
- Christia, A. M., & Ispriyarso, B. (2019). Desentralisasi Fiskal dan Otonomi Daerah di Indonesia. *Law Reform*, 15(1), 149.
- Cooper, D. R., & Schindler, P. S. (2014). *Metode Riset Bisnis* (9th ed.). Media Global Edukasi.
- Creswell, J. W., & Clark, V. L. P. (2011). Choosing a mixed methods design. In *Designing and Conducting Mixed Methods Research* (pp. 53–106). Sage Publications, Inc.
- Darmawan, N. S. (2008). *UNDP*. Retrieved from Studi Evaluasi Dampak Pemekaran daerah 2001-2007 oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) bekerja sama dengan United nations Development Programme (UNDP): <http://undp.or.id>
- Faguet, J.-P., & Pöschl, C. (2015). *Is decentralization good for development? Perspectives from academics and policy makers*.
- Ghulam, D. M. (2008). *Otonomi Daerah Dalam Kerangka Sumber Daya Manusia*. 1–10.
- Giantoro, H. M., Haryadi, H., & Purnomo, R. (2019). Pengaruh Kompetensi Guru, Kepemimpinan Kepala Sekolah Menurut Persepsi Guru Dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Guru Smk Negeri Di Kabupaten Purbalingga. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Akuntansi*, 21(2).
- Gulo, M. (2007). *Memahami dengan Benar Tujuan Pemekaran*. Retrieved from <http://niasbaratwordpress.com>.
- Hamri, E., Intan, E., Putri, K., Siregar, H. J., Bratakusumah, D. S., No, J. I., Puunaaha, K., Unaaha, K., Konawe, K., & Belakang, A. L. (2016). *Kebijakan Pemekaran Wilayah dan Pengembangan Pusat Pertumbuhan Ekonomi Kota Tasikmalaya*. 111–125.
- Harmantyo, D. (2010). Pemekaran Daerah dan Konflik Keruangan Kebijakan Otonomi Daerah dan Implementasinya di Indonesia. *MAKARA of Science*

- Series*, 11(1), 16–22. <https://doi.org/10.7454/mss.v11i1.220>
- Harmantyo, D. (2011). *Desentralisasi, Otonomi, Pemekaran Daerah, dan Pola Perkembangan Wilayah di Indonesia*. Retrieved from
- Haryadi, H., Iskandar, I., & Nofriansyah, D. (2016). The Constructivist Approach: Radical and Social Constructivism in the Relationship by Using the Implementation Career Level on the Vocational Education. *Innovation of Vocational Technology Education*, 12(1), 16–21.
- Hasil Pemilukada Musi Rawas Utara*. (2020). KPU Kabupaten Musi Rawas Utara.
- Hasyim Zoem, Y. (2017). *Hukum Pemerintahan Daerah Bandung* (1st ed.). Raja Grafindo Persada.
- Holt, F. L., Bilsborrow, R. E., & Oña, A. I. (2018). Demography, Household Economics, and Land and Resource Use of Five Indigenous Populations in the Northern Ecuadorian Amazon: A Summary of Ethnographic Research. *Latin American Studies Association in Rio de Janeiro*, 4(3), 11–14.
- Indikator Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013*. (2013). BPS Sumatera Selatan.
- Juhardi R.R, H. W. (2011). Studi Empiris Capaian MDGs di Provinsi Riau. *Jurnal Sosial Ekonomi Pembangunan*.
- Kabupaten Musi Rawas Utara*. (2020). Retrieved from musirawasutara.go.id
- Kalsum, U. (2013). Child morbidity, level of parent's education, and accessibility to health facilities as factors affecting Posyanduutilization. *Health Science Journal of Indonesia*, 4(1), 27–31.
- Kalsum, U., & Jahari, A. B. (2015). The Strategy to Reduce the Prevalence of Malnutrition among Children Under Five in Jambi Province. *Jmj*, 3(1), 45–59.
- Kaputra, I., & Simanjuntak, B. A. (2013). *Dampak Otonomi Daerah di Indonesia : Merangkai Sejarah Politik dan Pemerintahan Indonesia*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Khalid, T. (2012). *Otonomi Daerah: tujuan Pemekaran dan Penggabungan Daerah*. Retrieved from <http://tengkumesakhalid.blogspot.com>

- KPU Musi Rawas Utara. (2020). *KPU Musi Rawas Utara*. Retrieved from <https://kab-musirawasutara.kpu.go.id/>
- Kuswardinah, A. (2017). *Ilmu Kesejahteraan Keluarga*. Universitas Negeri Semarang Press.
- Lariki, O. E. S. (2012). Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Perekonomian Masyarakat di Kecamatan Bangkinang Menurut Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal UIN Syarif Kasim Riau*.
- Lundquist, J. H., Anderton, D. L., & Yaukey, D. B. (2015). *Demography: The Study of Human Population, Fourth Edition*.
- Marbun, B. N. (2010). *Otonomi Daerah 1945-2010: Proses dan Realita*. Pustaka Sinar Harapan.
- Maulana, R., & Bowo, P. A. (2014). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan, dan Teknologi Terhadap IPM Provinsi di Indonesia 2007-2011. *JEJAK Journal of Economics and Policy*, 7(2), 109–120.
- Marbun, B. (2010). *Otonomi Daerah 1945-2010 Proses dan Realita*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Nasria, S. (2018). *Implikasi sosial pemekaran wilayah terhadap kesejahteraan masyarakat di desa karave kabupaten mamuju utara skripsi*. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Nikasari, R. (2019). Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Pelayanan Publik: Studi Kasus Pemekaran Kecamatan Kranggan Mojokerto. *Unair Press*, 78, 1–12.
- Normina, N. (2016). Partisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan. *Ittihad*, 14(26), 71–85. <https://doi.org/10.18592/ittihad.v14i26.874>
- Novita, L. (2020). Dampak Pemekaran Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam. In *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung*.
- Park, M., & Kim, K. (2002). The Level Of Subjective Well-Being and Household Consumption Expenditures. *Journal Consumers and Families As Market Actors*.

- Patunru, A. A., & Hizkia Respatiadi. (2017). *Perlindungan bagi Petani: Upaya Peningkatan Kualitas Program Perlindungan Sosial bagi Para Pekerja di Sektor Pertanian di Indonesia*.
- Pemerintahan Kabupaten Musi Rawas Utara. (2013). *No Title*.
- Rambe, A. (2004). *Alokasi Pengeluaran Rumah Tangga dan Tingkat Kesejahteraan (Kasus di Kecamatan Medan Kota, Sumatera Utara)*. Institut Pertanian Bogor.
- Rasyid, R. (2002). *Menolak Resentralisasi Pemerintahan*. Millenium Publisher.
- Rewansyah, A. (2010). *Reformasi Birokrasi Dalam Rangka Good Governance*. Yusaintanas Prima.
- Rondinelli, D. A. (1981). Government Decentralization in Comparative Perspective: Theory and Practice in Developing Countries. *International Review of Administrative Sciences*, 47(2), 133–145.
- Rorong, I. (2018). *Analisis Dampak Pemekaran Kabupaten-Kota Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Provinsi Sulawesi Utara (Study di Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon)*.
- Samidu, M. A., Dengo, S., & Kolondam, H. (2016). Dampak kebijakan pemekaran wilayah. *Journal of Modern African Studies*, 35(17), 2104.
- Saparini, H. (2013). *Analisa Proses Administrasi Pemekaran Daerah Pada Departemen Dalam Negeri dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD)*. 1, 105–112.
- Saragih, J. P. (2003). *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah Dalam Otonomi*. Ghalia Indonesia.
- Siagian, M. (2012). *Kemiskinan dan Solusi*. Grasindo Monoratama.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfa Beta.
- Sumarwan, U., & Hira, T. K. (n.d.). *The Effects of Perceived Locus of Control and Perceived Income Adequacy on Satisfaction with Financial Status of Rural Households*. 14(4).
- Sunarti, E. (2006). *Indikator Keluarga Sejahtera; Sejarah Pengembangan, Evaluasi dan Keberlanjutannya*. Fakultas Ekologi Manusia IPB Press.
- Tarigan, R. (2005). *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Bumi Aksara.

- Umberson, D., & Gove, W. R. (1989). Parenthood and Psychological Well-Being. *Journal of Family Issues, 10*(4).
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009, 12 (2009).
- United Nation - World Tourism Organization. (2019). *World Tourism Statistic 2023*.
- Usman, Sinaga, B. M., & Siregar, H. (2005). Analisis Determinan Kemiskinan Sebelum dan Sesudah Desentralisasi Fiskal. *Institut Pertanian Bogor*, 1–17.
- Yusnani Hasyimzoem, d. (2016). *Hukum Pemerintahan Daerah*. Malang: CV. Cita Intrans Laras Wisma Kalimetro.

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1: GAMBAR BERSAMA RESPONDEN



Gambar 1: Menyampaikan pertanyaan kuesioner kepada responden Ibu Tumini (60 Tahun)



Gambar 2: Menyampaikan pertanyaan kuesioner kepada responden Ibu Sri Bawon (55 Tahun)





Gambar 5: Menyampaikan pertanyaan kuesioner kepada responden Ibu Irma (40 Tahun)



Gambar 6: Menyampaikan pertanyaan kuesioner kepada responden Ibu Marlinda (38 Tahun)





Gambar 9: Menyampaikan pertanyaan kuesioner kepada responden Bapak Rudi Hartono (65 Tahun)



Gambar 10: Menyampaikan pertanyaan kuesioner kepada responden Bapak Mujib (45 Tahun)



Gambar 11: Menyampaikan pertanyaan kuesioner kepada responden Ibu Ita Marleni (48 Tahun)

LAMPIRAN 2: OUTPUT SPSS

Analisis Data Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Aspek Ekonomi

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
E_Score_Pretest	191	97.4%	5	2.6%	196	100.0%
E_Score_Posttest	191	97.4%	5	2.6%	196	100.0%

Descriptives

		Statistic	Std. Error	
E_Score_Pretest	Mean	47.7801	.91092	
	95% Confidence Interval for Mean	Lower Bound	45.9833	
		Upper Bound	49.5769	
	5% Trimmed Mean	47.8066		
	Median	46.0000		
	Variance	158.488		
	Std. Deviation	12.58921		
	Minimum	15.00		
	Maximum	75.00		
	Range	60.00		
	Interquartile Range	24.00		
	Skewness	-.232	.176	
	Kurtosis	-.961	.350	
E_Score_Posttest	Mean	124.0000	1.16725	
	95% Confidence Interval for Mean	Lower Bound	121.6976	
		Upper Bound	126.3024	
	5% Trimmed Mean	124.3188		
	Median	120.0000		
	Variance	260.232		
	Std. Deviation	16.13169		
	Minimum	76.00		
	Maximum	150.00		
	Range	74.00		
	Interquartile Range	28.00		
	Skewness	-.143	.176	
	Kurtosis	-.664	.350	

Analisis Data Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Aspek Pendidikan

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
P_Score_Pretest	190	96.9%	6	3.1%	196	100.0%
P_Score_Posttest	190	96.9%	6	3.1%	196	100.0%

Descriptives

		Statistic	Std. Error	
P_Score_Pretest	Mean	47.1947	.89582	
	95% Confidence Interval for Mean	Lower Bound	45.4276	
		Upper Bound	48.9618	
	5% Trimmed Mean	47.2047		
	Median	45.0000		
	Variance	152.475		
	Std. Deviation	12.34808		
	Minimum	15.00		
	Maximum	75.00		
	Range	60.00		
	Interquartile Range	22.25		
	Skewness	-.130	.176	
	Kurtosis	-.888	.351	
P_Score_Posttest	Mean	124.0579	1.11745	
	95% Confidence Interval for Mean	Lower Bound	121.8536	
		Upper Bound	126.2622	
	5% Trimmed Mean	124.2807		
	Median	120.5000		
	Variance	237.251		
	Std. Deviation	15.40294		
	Minimum	90.00		
	Maximum	150.00		
	Range	60.00		
	Interquartile Range	24.00		
	Skewness	-.072	.176	
	Kurtosis	-.662	.351	

Analisis Data Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Aspek Kesehatan

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
K_Score_Pretest	192	98.0%	4	2.0%	196	100.0%
K_Score_Posttest	192	98.0%	4	2.0%	196	100.0%

Descriptives

		Statistic	Std. Error	
K_Score_Pretest	Mean	47.2552	.88123	
	95% Confidence Interval for Mean	Lower Bound	45.5170	
		Upper Bound	48.9934	
	5% Trimmed Mean	47.2627		
	Median	45.0000		
	Variance	149.102		
	Std. Deviation	12.21074		
	Minimum	15.00		
	Maximum	75.00		
	Range	60.00		
	Interquartile Range	19.75		
	Skewness	-.140	.175	
	Kurtosis	-.825	.349	
K_Score_Posttest	Mean	124.4688	1.08674	
	95% Confidence Interval for Mean	Lower Bound	122.3252	
		Upper Bound	126.6123	
	5% Trimmed Mean	124.6470		
	Median	121.0000		
	Variance	226.753		
	Std. Deviation	15.05832		
	Minimum	90.00		
	Maximum	150.00		
	Range	60.00		
	Interquartile Range	18.75		
	Skewness	-.074	.175	
	Kurtosis	-.601	.349	

Analisis Data Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Aspek Sosial

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
S_Score_Pretest	189	96.4%	7	3.6%	196	100.0%
S_Score_Posttest	189	96.4%	7	3.6%	196	100.0%

Descriptives

		Statistic	Std. Error	
S_Score_Pretest	Mean	47.1905	.90097	
	95% Confidence Interval for Mean	Lower Bound	45.4132	
		Upper Bound	48.9678	
	5% Trimmed Mean	47.0106		
	Median	45.0000		
	Variance	153.421		
	Std. Deviation	12.38632		
	Minimum	15.00		
	Maximum	75.00		
	Range	60.00		
	Interquartile Range	22.00		
	Skewness	.015	.177	
	Kurtosis	-.845	.352	
	S_Score_Posttest	Mean	125.2434	1.09794
95% Confidence Interval for Mean		Lower Bound	123.0775	
		Upper Bound	127.4093	
5% Trimmed Mean		125.5394		
Median		123.0000		
Variance		227.834		
Std. Deviation		15.09417		
Minimum		75.00		
Maximum		150.00		
Range		75.00		
Interquartile Range		16.00		
Skewness		-.240	.177	
Kurtosis		-.141	.352	

Hasil Uji Normalitas Aspek Ekonomi

	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
E_Score_Pretest	.185	191	.000	.887	191	.000
E_Score_Posttest	.150	191	.000	.940	191	.000

a. Lilliefors Significance Correction

Hasil Uji Normalitas Aspek Pendidikan

	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
P_Score_Pretest	.182	190	.000	.893	190	.000
P_Score_Posttest	.120	190	.000	.939	190	.000

a. Lilliefors Significance Correction

Hasil Uji Normalitas Aspek Kesehatan

	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
K_Score_Pretest	.181	192	.000	.892	192	.000
K_Score_Posttest	.133	192	.000	.940	192	.000

a. Lilliefors Significance Correction

Hasil Uji Normalitas Aspek Sosial

	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
S_Score_Pretest	.188	189	.000	.896	189	.000
S_Score_Posttest	.121	189	.000	.942	189	.000

a. Lilliefors Significance Correction

Hasil Uji Wilcoxon Signed Rank Test

Ranks

		N	Mean Rank	Sum of Ranks
E_Score_Posttest -	Negative Ranks	0 ^a	.00	.00
E_Score_Pretest	Positive Ranks	191 ^b	96.00	18336.00
	Ties	0 ^c		
	Total	191		

a. E_Score_Posttest < E_Score_Pretest

b. E_Score_Posttest > E_Score_Pretest

c. E_Score_Posttest = E_Score_Pretest

Test Statistics^a

	E_Score_Posttest - E_Score_Pretest
Z	-12.010 ^b
Asymp. Sig. (2-tailed)	.000

a. Wilcoxon Signed Ranks Test

b. Based on negative ranks.

Lampiran 3: Data Responden Penelitian

	Nama Responden	Usia Responden	Jenis Kelamin	Pendidikan Terakhir	Agama
1	Melanza Parmiyati	23	Perempuan	Starata 1 / 2 / 3	Islam
2	Sukri Aburman	50	Laki - laki	SMA Sederajat	Islam
3	Nova Atriani Yolanda	30	Perempuan	Starata 1 / 2 / 3	Islam
4	Ramazani Novanda	33	Laki - laki	Starata 1 / 2 / 3	Islam
5	Nofi Ramayani	22	Perempuan	SMA Sederajat	Islam
6	Ramadan	22	Laki - laki	SMA Sederajat	Islam
7	Ulandari	25	Perempuan	SMA Sederajat	Islam
8	Nurdiansyah	28	Laki - laki	Starata 1 / 2 / 3	Islam
9	Meru Sanjaya	33	Laki - laki	Diploma	Islam
10	Anggun Saputri	25	Perempuan	SMA Sederajat	Islam
11	Hari Tri Handoko	35	Laki - laki	SD Sederajat	Kristen
12	Wahyu Rohayati	30	Perempuan	SMA Sederajat	Islam
13	Marissa Tri Rezki	27	Perempuan	SMP Sederajat	Islam
14	Bella Sanjaya Putri	25	Perempuan	SMP Sederajat	Islam
15	Fani Santoso	28	Laki - laki	SMA Sederajat	Islam
16	Lenny Harlina	29	Perempuan	Starata 1 / 2 / 3	Islam
17	Azis Syaputra	30	Laki - laki	Starata 1 / 2 / 3	Islam
18	Mutiarni	25	Perempuan	Starata 1 / 2 / 3	Islam
19	Januardi Ritonga	33	Laki - laki	Diploma	Katolik
20	Febri Satria Kuswanto	30	Laki - laki	SMA Sederajat	Islam
21	Ekka Yus Endang	25	Perempuan	Starata 1 / 2 / 3	Islam
22	Yuliana	27	Perempuan	SMA Sederajat	Islam
23	Yulinda Permata Sari	35	Perempuan	Diploma	Islam
24	Meika Theresia Rut Olani Hutagalung	27	Perempuan	Starata 1 / 2 / 3	Katolik
25	Frengki Pratama	30	Laki - laki	SMP Sederajat	Islam
26	Erfin Setiawan	33	Laki - laki	SMA Sederajat	Islam
27	Bayu Miyoso	27	Laki - laki	SMP Sederajat	Islam
28	Indah Meliasari	23	Perempuan	Diploma	Islam
29	Mutia Arfianita Siregar	27	Perempuan	Diploma	Islam
30	Nurul Padril Huda	28	Perempuan	SD Sederajat	Islam
31	Ismail Rambe	30	Laki - laki	SD Sederajat	Islam
32	Soleha	26	Perempuan	SMA Sederajat	Islam
33	Anang Awi	35	Laki - laki	Starata 1 / 2 / 3	Islam

34	Ika Lestari	25	Perempuan	Starata 1 / 2 / 3	Islam
35	Aryono	40	Laki - laki	SMA Sederajat	Islam
36	Kurnia Sandi	27	Laki - laki	Diploma	Islam
37	Yusri Bitra Azezeya	29	Laki - laki	Starata 1 / 2 / 3	Islam
38	Muhammad Wildan Hakim	34	Laki - laki	SMA Sederajat	Islam
39	Ade Sanjaya	28	Laki - laki	Diploma	Islam
40	Ahmad Suryanto	33	Laki - laki	Starata 1 / 2 / 3	Katolik
41	Darmayani	23	Perempuan	Starata 1 / 2 / 3	Islam
42	Halimatus saadiah	24	Perempuan	SMA Sederajat	Islam
43	Siti Aisyah	24	Perempuan	SMA Sederajat	Islam
44	Liany Saputri	23	Perempuan	Diploma	Islam
45	Maria Hartati	28	Perempuan	Diploma	Islam
46	Marissa Friska	25	Perempuan	Starata 1 / 2 / 3	Katolik
47	Nur Aini	23	Perempuan	Starata 1 / 2 / 3	Islam
48	Dila Anggraeni	24	Perempuan	Starata 1 / 2 / 3	Islam
49	Juwita Puspita Sari	27	Perempuan	SMA Sederajat	Islam
50	Lisa Saputri	29	Perempuan	Starata 1 / 2 / 3	Islam
51	Maya Anggraini	25	Perempuan	Diploma	Islam
52	Kusmita	27	Perempuan	Diploma	Islam
53	Ria Rumini	28	Perempuan	Starata 1 / 2 / 3	Islam
54	Rizky KurniaWati	28	Perempuan	Starata 1 / 2 / 3	Islam
55	Aan Ramadan	33	Laki - laki	SMA Sederajat	Islam
56	Ahmad Akbar	29	Laki - laki	Starata 1 / 2 / 3	Islam
57	Hamdani	32	Laki - laki	SMP Sederajat	Islam
58	Wardan Saputra	32	Laki - laki	SMA Sederajat	Islam
59	Muhammad Anwar	33	Laki - laki	SMP Sederajat	Islam
60	Aslam	35	Laki - laki	Starata 1 / 2 / 3	Islam
61	Hendri Gunawan	35	Laki - laki	SD Sederajat	Islam
62	Rico Fardiansyah	34	Laki - laki	Starata 1 / 2 / 3	Islam
63	Afrindah	23	Perempuan	Diploma	Islam
64	Nur Ilam Panjaitan	28	Perempuan	SMA Sederajat	Islam
65	Aminurrohman	38	Laki - laki	Diploma	Islam
66	Antoni Miraharja	40	Laki - laki	Starata 1 / 2 / 3	Kristen
67	Reza Yuda Lesmana	38	Laki - laki	Starata 1 / 2 / 3	Katolik
68	Putri Handayani	28	Perempuan	Starata 1 / 2 / 3	Islam
69	Dika Abdullah Mawardi	37	Laki - laki	Diploma	Katolik

70	Eli Kusjayanti	29	Perempuan	Starata 1 / 2 / 3	Katolik
71	Sovia Pitriani	30	Perempuan	SD Sederajat	Islam
72	Yulia Amora	35	Perempuan	SD Sederajat	Islam
73	Aulia Aminatuzuriah	28	Perempuan	SD Sederajat	Islam
74	Ismi Zahira	23	Perempuan	SMA Sederajat	Islam
75	Lili Putri	29	Perempuan	SMP Sederajat	Islam
76	Nur Erla	35	Perempuan	Diploma	Islam
77	Sukma Dewi Herlina	26	Perempuan	Starata 1 / 2 / 3	Islam
78	Indra Iswadi	33	Laki - laki	SMP Sederajat	Islam
79	Mauludin Al Ibnu	30	Laki - laki	Diploma	Islam
80	Yoga Beja	27	Laki - laki	Starata 1 / 2 / 3	Islam
81	Nur Aini Kalkar	28	Perempuan	Starata 1 / 2 / 3	Islam
82	Asnaini	35	Perempuan	Starata 1 / 2 / 3	Islam
83	Evi Maheswari	23	Perempuan	Starata 1 / 2 / 3	Islam
84	Hoirul Rizal	25	Perempuan	Starata 1 / 2 / 3	Kristen
85	Juanda Putra Siregar	35	Laki - laki	Starata 1 / 2 / 3	Islam
86	Aas Astriyana	33	Perempuan	SMA Sederajat	Islam
87	Apriwanto	35	Laki - laki	SMA Sederajat	Islam
88	Doli Martua Siregar	34	Laki - laki	SMP Sederajat	Islam
89	Ari Anggara	40	Laki - laki	SD Sederajat	Islam
90	Azhari	33	Laki - laki	SMA Sederajat	Islam
91	Fahmi Ridho	35	Laki - laki	SMP Sederajat	Islam
92	Hardianto	32	Laki - laki	Starata 1 / 2 / 3	Islam
93	Heru Ardiansyah Saputra	37	Laki - laki	SMA Sederajat	Islam
94	Zaidan abidin	36	Laki - laki	SMA Sederajat	Islam
95	Jailani Mustofa	37	Laki - laki	SMA Sederajat	Islam
96	Jumei Ariansyah	33	Laki - laki	SMA Sederajat	Islam
97	Khadapi	30	Laki - laki	SMA Sederajat	Islam
98	Minarno	28	Laki - laki	Starata 1 / 2 / 3	Islam
99	Rayan Arpandi	29	Laki - laki	Starata 1 / 2 / 3	Islam
100	Samsul	37	Laki - laki	Starata 1 / 2 / 3	Islam
101	Subhi Wiryatama	35	Laki - laki	Starata 1 / 2 / 3	Islam
102	Sugi Wardoyo	45	Laki - laki	SD Sederajat	Islam
103	Marjuki	35	Laki - laki	SD Sederajat	Islam
104	Agusti	27	Laki - laki	SMA Sederajat	Islam
105	Alif Qurota A'yun	27	Laki - laki	Starata 1 / 2 / 3	Islam

106	Amanatun Khoiro adawiyah	30	Perempuan	SMA Sederajat	Islam
107	Amelia Primadani	29	Perempuan	Starata 1 / 2 / 3	Islam
108	Anuar fuat	34	Laki - laki	SD Sederajat	Islam
109	Asiah Chairunnisa	38	Perempuan	Diploma	Islam
110	Asnaini	33	Perempuan	Starata 1 / 2 / 3	Islam
111	Rahmat Hidayat	30	Laki - laki	SMA Sederajat	Islam
112	M. Basir	35	Laki - laki	Starata 1 / 2 / 3	Islam
113	Ibie Patria	39	Perempuan	Starata 1 / 2 / 3	Islam
114	Intan Permata Sari	25	Perempuan	Starata 1 / 2 / 3	Islam
115	Robi Saputra	26	Laki - laki	Starata 1 / 2 / 3	Islam
116	Nur Sukma Wati	35	Perempuan	Starata 1 / 2 / 3	Islam
117	Yulida	37	Perempuan	Diploma	Islam
118	Junita Aprianita	36	Perempuan	Starata 1 / 2 / 3	Islam
119	Bunga Anggraeni	28	Perempuan	Diploma	Islam
120	Alhairi	35	Laki - laki	Diploma	Islam
121	Citra Ariyani Siregar	34	Perempuan	Starata 1 / 2 / 3	Islam
122	Dapit Napora	27	Laki - laki	SMA Sederajat	Islam
123	Deden Arfani	38	Laki - laki	SMA Sederajat	Islam
124	Dewi setyaning Tyas	29	Perempuan	SMA Sederajat	Islam
125	Dewi Saputri	37	Perempuan	SMA Sederajat	Islam
126	Doni Alif Utomo	28	Laki - laki	Starata 1 / 2 / 3	Islam
127	Putri ullah Mafina	28	Perempuan	SMA Sederajat	Islam
128	Erik Susanto	30	Laki - laki	Starata 1 / 2 / 3	Islam
129	Gusti Rahmasari	35	Perempuan	Starata 1 / 2 / 3	Islam
130	Hafiz Julianto	30	Laki - laki	Starata 1 / 2 / 3	Kristen
131	Hanifa Pisatrie	28	Perempuan	SMA Sederajat	Islam
132	Haumis Sholehah	29	Laki - laki	SMA Sederajat	Islam
133	Henny Anggraeni	33	Perempuan	Starata 1 / 2 / 3	Islam
134	Husni Mubarak	29	Laki - laki	Starata 1 / 2 / 3	Islam
135	Ibnu Suhadak	35	Laki - laki	Starata 1 / 2 / 3	Islam
136	Jasman	29	Laki - laki	SMA Sederajat	Islam
137	Juarman Puspandi	30	Laki - laki	Starata 1 / 2 / 3	Islam
138	Jumadil	35	Laki - laki	SMA Sederajat	Islam
139	Waroko Hakim Raka	35	Laki - laki	Starata 1 / 2 / 3	Islam
140	Romadhon	30	Laki - laki	Starata 1 / 2 / 3	Islam
141	Yiki Netra	28	Perempuan	Starata 1 / 2 / 3	Islam

142	Laura Veronica	28	Perempuan	Starata 1 / 2 / 3	Islam
143	Ninna Yuliana	29	Perempuan	SMA Sederajat	
144	Primadona Rangkuti	30	Perempuan	Starata 1 / 2 / 3	Islam
145	Hendriyeldi	40	Laki - laki	Starata 1 / 2 / 3	Islam
146	Nafrizal	40	Laki - laki	Starata 1 / 2 / 3	Islam
147	Jemi Eka Putra	40	Laki - laki	SMA Sederajat	Islam
148	Rusdi Alamsyah	48	Laki - laki	Starata 1 / 2 / 3	Islam
149	Zamzami zikrullah	45	Laki - laki	Starata 1 / 2 / 3	Islam
150	Pangaji Aji Wicaksono	28	Laki - laki	Starata 1 / 2 / 3	Islam
151	Paqi Altariq	30	Laki - laki	Starata 1 / 2 / 3	Islam
152	Safa Marwah	30	Perempuan	Starata 1 / 2 / 3	Islam
153	Sahara	28	Perempuan	Starata 1 / 2 / 3	Islam
154	Lisa Novita Sari	29	Perempuan	Starata 1 / 2 / 3	Islam
155	Sherly Novita Jayanti	29	Perempuan	Starata 1 / 2 / 3	Islam
156	Tri Fatiqoh	28	Perempuan	Starata 1 / 2 / 3	Islam
157	Vita Suri Mariyeni	27	Perempuan	Starata 1 / 2 / 3	Islam
158	Winda Nurmaulida	28	Perempuan	Starata 1 / 2 / 3	Islam
159	Yudi Apri Sumantio	30	Laki - laki	Starata 1 / 2 / 3	Islam
160	Mariyani	30	Perempuan	Starata 1 / 2 / 3	Islam
161	Miftah Nur Fauziah	27	Perempuan	Starata 1 / 2 / 3	Islam
162	Munawaroh	27	Perempuan	SMA Sederajat	Islam
163	Neli Sumarni	28	Perempuan	Starata 1 / 2 / 3	Islam
164	Nining Sulistina	32	Perempuan	Starata 1 / 2 / 3	Islam
165	Nopa Supensi	33	Perempuan	Starata 1 / 2 / 3	Islam
166	Rohani	35	Perempuan	SMA Sederajat	Islam
167	Septi Karlinda	35	Perempuan	Starata 1 / 2 / 3	Islam
168	Supinnah	36	Perempuan	SMA Sederajat	Islam
169	Kuswatun Hasanah	34	Perempuan	Starata 1 / 2 / 3	Islam
170	Wanda Saputri Ardiansyah	29	Perempuan	Starata 1 / 2 / 3	Islam
171	Zakia Purnama Sari	29	Perempuan	Starata 1 / 2 / 3	Islam
172	Ujang Babas	30	Laki - laki	Starata 1 / 2 / 3	Islam
173	Darul Qutni	38	Laki - laki	Starata 1 / 2 / 3	Islam
174	Andik Firmansyah	33	Laki - laki	SMA Sederajat	Islam
175	Saddam Hussein Pratama Anugrah	37	Laki - laki	Starata 1 / 2 / 3	Islam
176	Sulaiman Syamsu	27	Laki - laki	SMA Sederajat	Islam
177	Ade Sayuti	29	Laki - laki	SMA Sederajat	Islam

178	Iskandar Dinata	35	Laki - laki	Starata 1 / 2 / 3	Islam
179	Dedek Martius Hutagalung	29	Laki - laki	Starata 1 / 2 / 3	Kristen
180	M.Afif Milano	39	Laki - laki	Starata 1 / 2 / 3	Islam
181	Didik suhendri	33	Laki - laki	Starata 1 / 2 / 3	Islam
182	Arya Wiloka Dinata	30	Laki - laki	Starata 1 / 2 / 3	Islam
183	Alan Dewa Indrawan	35	Laki - laki	SMA Sederajat	Islam
184	Hendri Juliansyah Hakim	35	Laki - laki	Starata 1 / 2 / 3	Islam
185	Irma Hapsari	37	Perempuan	Starata 1 / 2 / 3	Islam
186	Tumini	60	Perempuan	SD Sederajat	Islam
187	Sri Bawon	55	Perempuan	SD Sederajat	Islam
188	Irma	40	Perempuan	SMA Sederajat	Islam
189	Nonik	33	Perempuan	Strata 1 / 2 / 3	Kristen
190	Rubiah	41	Perempuan	SMA Sederajat	Islam
191	Hj.Zubaidah	80	Perempuan	SD Sederajat	Islam
192	Rawasi	57	Perempuan	SD Sederajat	Islam
193	Ita Marleni	48	Perempuan	SMP Sederajat	Islam
194	Mujib	45	Laki – laki	SMP Sederajat	Islam
195	Marlinda	38	Perempuan	SMP Sederajat	Islam
196	Rudi Hartono	65	Laki – laki	SMA Sederajat	Islam

Data selengkapnya beserta pertanyaan kuesioner dan jawaban responden dapat dilihat pada link berikut: https://docs.google.com/forms/d/1tMaF2izt0Qgq-X_KHRbUt_1TMtlQNMMyiPGgtJ4OrH-8/edit#responses